



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

*The Influence of Internal Control System on The Reliability of Financial
Statements with Mediation of Fixed Assets Administration
at The Government of Bondowoso Regency*

TESIS

Oleh

Emy Dwi Trisnani

NIM 150820101066

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

*The Influence of Internal Control System on The Reliability of Financial
Statements with Mediation of Fixed Assets Administration
at The Government of Bondowoso Regency*

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Manajemen
dan mencapai gelar Magister Manajemen

Oleh

Emy Dwi Trisnani

NIM 150820101066

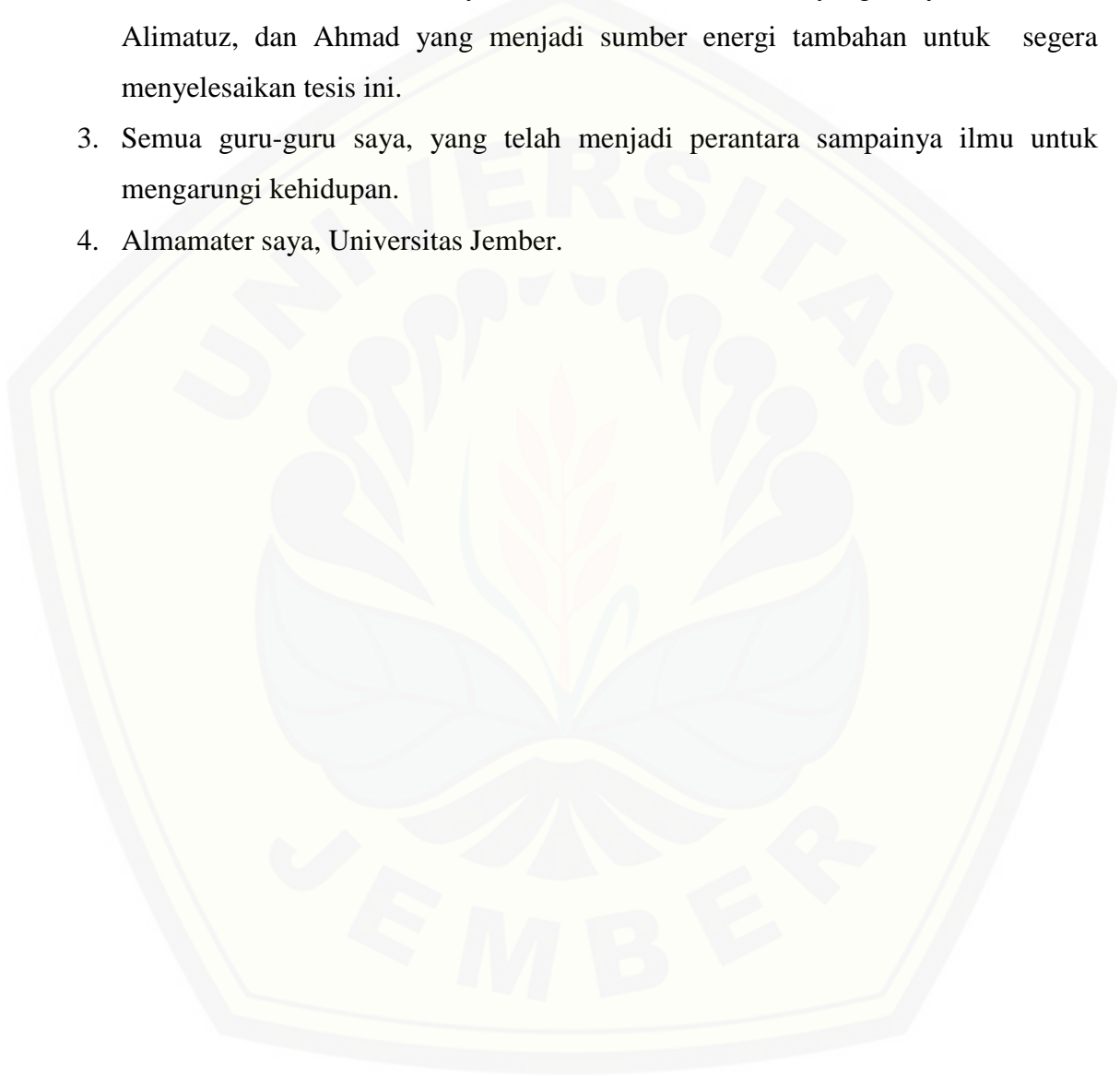
**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda tercinta, Sri Indarti yang selalu memberi semangat dan do'a.
2. Suamiku tercinta, Fuat Albayumi, dan anak-anakku tersayang Aisyah, Shabrina, Alimatuz, dan Ahmad yang menjadi sumber energi tambahan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Semua guru-guru saya, yang telah menjadi perantara sampainya ilmu untuk mengarungi kehidupan.
4. Almamater saya, Universitas Jember.



MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(Q.S. Insyirah: 6-8).



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emy Dwi Trisnani

NIM : 150820101066

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso ” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2017

Yang menyatakan,

(Emy Dwi Trisnani)
NIM 150820101066

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh

Emy Dwi Trisnani
NIM 150820101066

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Mohamad Dimiyati, M. Si.

Dosen pembimbing Anggota : Hadi Paramu, MBA, Ph.D

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso” telah disetujui pada :

hari, tanggal : Jum'at, 12 Mei 2017

tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Mohamad Dimiyati, M. Si.
NIP. 196704211994031008

Hadi Paramu, MBA, Ph.D.
NIP.196901201993031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

Dr. Hari Sukarno, M.M.
NIP. 196105301998021001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso” karya Emy Dwi Trisnani telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Minggu, 28 Mei 2017

tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Prof. Dr. Raden Andi Sularso, MSM.
NIP. 196004131986031002

Anggota I

Anggota II

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.
NIP. 196608051992012001

Dr. Nurhayati, M.M.
NIP.196106071987022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.,CA.
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. Emy Dwi Trisnani, 150820101066; 73 halaman; Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dapat diandalkan agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas 533 LKPD Tahun Anggaran 2015 masih menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 6.150 yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan terdapat 188 pemerintah daerah belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) karena penyajian aset tetap tidak sesuai dengan SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu juga ikut mendasari dilakukannya penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak 164 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Proportionate Stratified Random Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 118 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa hasil kuesioner yang berasal dari responden dan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2016 dan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling (SEM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan, b) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap penatausahaan aset tetap, c) penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan

laporan keuangan, dan d) penatausahaan aset tetap mempunyai peranan yang lebih penting dalam mempengaruhi keandalan laporan keuangan dibandingkan dengan pengaruh langsung Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan.



SUMMARY

The influence of Internal Control System on The Reliability of Financial Statements with Mediation of Fixed Assets Administration at The Government of Bondowoso Regency. Emy Dwi Trisnani, 150820101066; 73 pages; Magister Management Program Faculty of Economics and Business University of Jember.

Government financial statements as a form of accountability for state financial management must be reliable in order that the information presented is useful for users in assessing accountability and decision making. the audit report of BPK RI on 533 Local Government Financial Report (LKPD) in fiscal year of 2015 still found the weakness of Internal Control System in 6,150 cases which affect the financial statements reliability in which 188 local governments have not obtained unqualified opinion (WTP) because the presentation of fixed assets is not suitable in accordance with SAP. This study aims to examine and analyze the influence of Internal Control System on the financial statements reliability with the administration of fixed assets as intervening variable at the Government of Bondowoso Regency.

The population of this study are 164 people whom are Financial Administration Officers, Expenditure Treasurers, and Assets Administration Officers of Local Government Work Unit (SKPD) of Bondowoso Regency. This study uses Proportionate Stratified Random Sampling with 118 respondents which calculated based on Slovin formula. Data sources of this research is primary data which obtained by questionnaires from respondents, and secondary data from The Audit Report of BPK RI on LKPD of Bondowoso Regency at 2016, and Audit Report of BPK RI on LKPD at 2016. The data then were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) analysis.

The result of this research shows that: a) Internal Control System has a significant positive effect on the reliability of financial statements, b) Internal Control System has a significant positive effect on the administration of fixed assets, c) the administration of fixed assets has a significant positive effect on the reliability of financial statements, and d) the administration of fixed assets has a more important role in influencing the reliability of financial statements than the direct effect of the Internal Control System on the reliability of financial statements.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso” . Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Mohamad Dimiyati, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Hadi Paramu, MBA, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Raden Andi Sularso, MSM., Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak., dan Ibu Dr. Nurhayati, M.M., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini;
4. Seluruh dosen pada Program Studi Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan Pihak Pengelola Beasiswa STAR BPKP yang membantu penulis menyusun tesis ini;
5. Teman-teman seperjuangan mahasiswa STAR BPKP Batch II yang saling mendorong untuk menyelesaikan studi S2 ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tesis ini sangat terbuka dengan proses perbaikan, sehingga kritik dan saran membangun dari berbagai pihak akan memperkaya dan mempermudah proses penyempurnaannya. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2017

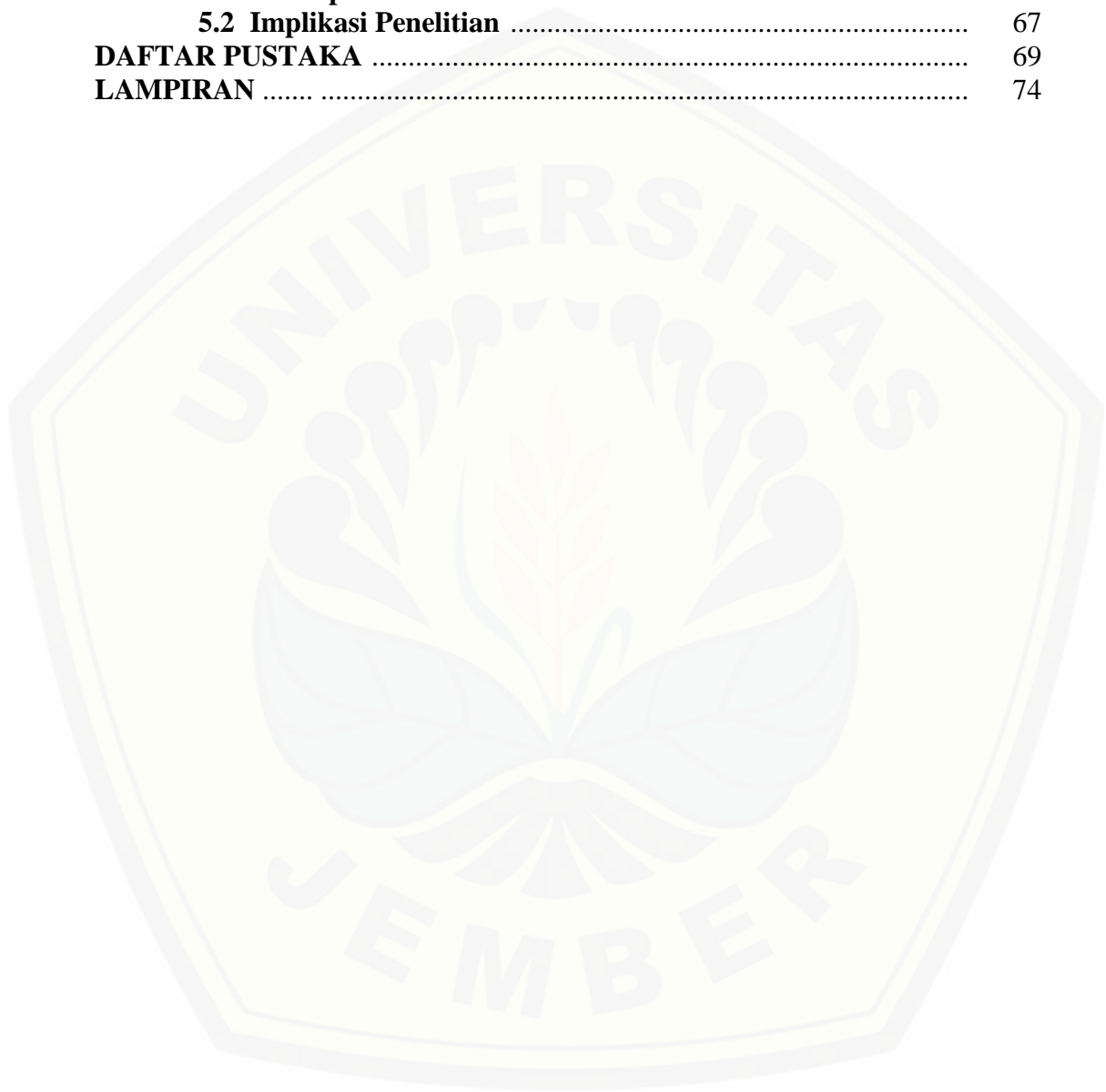
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Sinyal (<i>Signaling Theory</i>)	9
2.2 Sistem Pengendalian Intern	10
2.2.1 Pengendalian Internal	10
2.2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	11
2.2.3 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern	12
2.3 Keandalan Laporan Keuangan (<i>Reliability</i>)	17
2.4 Penatausahaan Aset Tetap	21
2.5 Penelitian Terdahulu	24
2.6 Kerangka Konseptual	25
2.7 Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	27
2.8 Hipotesis Penelitian	28
2.8.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan	28
2.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan Aset Tetap	29
2.8.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Keuangan	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32

3.4 Metode Pengumpulan Data	32
3.5 Identifikasi Variabel	33
3.6 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran	33
3.7 Uji Instrumen Penelitian	34
3.8 Teknik Analisis Data	35
3.8.1 Uji Asumsi <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	36
3.8.2 Uji Hipotesis	36
3.9 Kerangka Pemecahan Masalah	39
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
4.2 Karakteristik Responden	40
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	41
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	41
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan	42
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja	43
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Bimbingan Teknis	43
4.3 Statistik Deskriptif Variabel	44
4.3.1 Deskripsi Penilaian Responden terhadap Variabel Sistem Pengendalian Intern	45
4.3.2 Deskripsi Penilaian Responden terhadap Variabel Penatausahaan Aset Tetap	45
4.3.3 Deskripsi Penilaian Responden terhadap Variabel Keandalan Laporan Keuangan	46
4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	47
4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Sistem Pengendalian Intern	47
4.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Penatausahaan Aset Tetap	50
4.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Keandalan Laporan Keuangan	51
4.5 Uji Asumsi <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	53
4.5.1 Uji Normalitas	53
4.5.2 Uji Outlier	54
4.6 Analisis <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	55
4.6.1 Uji Kesesuaian Model	56
4.6.2 Uji Kausalitas (Uji Hipotesis)	56
4.7 Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	58
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian	59
4.8.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan	59
4.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan Aset Tetap	60

4.8.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Keuangan	62
4.8.4 Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	63
4.9 Keterbatasan Penelitian	64
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah aset tetap dan total aset tahun 2012-2015	6
1.2 Kelemahan SPI terkait penatausahaan aset tetap	7
3.1 Definisi operasional variabel	34
3.2 Uji kelayakan model	37
4.1 Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin	41
4.2 Karakteristik responden berdasarkan jabatan dan jenis kelamin.....	42
4.3 Karakteristik responden berdasarkan jabatan dan pendidikan	42
4.4 Karakteristik responden berdasarkan jabatan dan masa kerja	43
4.5 Karakteristik responden berdasarkan jabatan dan bimbingan teknis ...	44
4.6 Penilaian responden terhadap Sistem Pengendalian Intern	45
4.7 Penilaian responden terhadap penatausahaan aset tetap	46
4.8 Penilaian responden terhadap keandalan laporan keuangan	46
4.9 Hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk SPI	49
4.10 Hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk penatausahaan aset tetap .	51
4.11 Hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk keandalan laporan keuangan	53
4.12 Hasil uji normalitas	54
4.13 Hasil uji kelayakan model SEM	56
4.14 Hasil pengujian kausalitas	56
4.15 Pengaruh langsung variabel penelitian	58
4.16 Pengaruh tidak langsung variabel penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Komposisi kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 ..	3
1.2 Akun yang disajikan tidak sesuai SAP pada LKPD Tahun 2015	6
2.1 Kerangka konseptual	26
3.1 Diagram jalur	37
3.2 Kerangka pemecahan masalah	39
4.1 Diagram analisis faktor konfirmatori konstruk SPI tahap I	48
4.2 Diagram analisis faktor konfirmatori konstruk SPI tahap II	49
4.3 Diagram analisis faktor konfirmatori konstruk penatausahaan aset tetap tahap I	50
4.4 Diagram analisis faktor konfirmatori konstruk penatausahaan aset tetap tahap II	51
4.5 Diagram analisis faktor konfirmatori konstruk keandalan laporan keuangan tahap I	52
4.6 Diagram analisis faktor konfirmatori konstruk keandalan laporan keuangan tahap II	52
4.7 Diagram jalur pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	74
4.1 Langkah Pengambilan Sampel.....	77
4.2 Hasil Output SPSS Karakteristik Deskriptif Responden	79
4.3 Kuesioner Penelitian	84
4.4 Data Hasil Kuesioner	88
4.5 Hasil Output SPSS Frekuensi Variabel.....	93
4.6 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Sistem Pengendalian Intern Tahap 1 dengan program AMOS 5.0	101
4.7 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Sistem Pengendalian Intern Tahap II dengan program AMOS 5.0 dan Perhitungan Reliabilitas	102
4.8 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Penatausahaan Aset Tetap Tahap 1 dengan program AMOS 5.0	103
4.9 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Penatausahaan Aset Tetap Tahap II dengan program AMOS 5.0 dan Perhitungan Reliabilitas	104
4.10 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Keandalan Laporan Keuangan Tahap I dengan program AMOS 5.0	105
4.11 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Keandalan Laporan Keuangan Tahap II dengan program AMOS 5.0 dan Perhitungan Reliabilitas	106
4.12 Hasil Analisis SEM dengan program AMOS 5.0	107

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen pada instansi pemerintah harus memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel (Karmila *et al.*, 2014). Pemerintah Indonesia merespon tuntutan transparansi dan akuntabilitas dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (Ichlas *et al.*, 2014). Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan pemerintah mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Keandalan laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Keandalan adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) digunakan sebagai dasar penyusunan LKPD (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). LKPD harus dapat diandalkan agar bermanfaat bagi para pengguna, maka LKPD disusun

berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 pasal 56 ayat (4) yaitu kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Sistem Pengendalian Intern yang baik diharapkan meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Karmila *et al.*, 2014).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan keuangan harus melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPI untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Sistem Pengendalian Intern yang baik dapat digunakan sebagai sebuah proses penyaringan untuk mencegah atau mendeteksi tingkat salah saji dalam laporan keuangan (Bastian, 2014:254). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK tahun 2016 atas 533 LKPD tahun 2015 mengungkapkan adanya kelemahan SPI sebanyak 6.150 temuan. Permasalahan SPI pada pemerintah daerah ditunjukkan pada Gambar 1.1 terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 2.353 permasalahan (38%), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.450 permasalahan (40%), dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.347 permasalahan (22%). Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mempunyai kelemahan berupa pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan laporan tidak memadai, dan belum didukung SDM yang memadai.



Gambar 1.1 Komposisi kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 (Sumber : BPK RI, 2016)

Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mempunyai kelemahan berupa pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan laporan tidak memadai, dan belum didukung SDM yang memadai. Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mempunyai kelemahan berupa penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pemerintah daerah. Struktur pengendalian intern mempunyai kelemahan antara lain *standard operating procedure* (SOP) belum disusun, SOP tidak ditaati, entitas tidak memiliki satuan pengawas intern atau satuan pengawas intern tidak optimal, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi (BPK RI, 2016). Pencatatan yang tidak akurat dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa SPI yang lemah akan mempengaruhi keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Sari dan Witono (2014); Herawati (2014); Widyaningsih *et al.* (2011); Desmiyawati (2014); dan Afiah dan Azwari (2015) menemukan bahwa SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian Mulyani dan Suryawati (2011) juga menunjukkan bahwa SPI mempunyai peran dan fungsi yang signifikan dalam

meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Suwanda (2015) yang menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian Manaf *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Hal ini disebabkan responden yang diambil adalah pereviu laporan keuangan sehingga pemahaman tentang SPI terbatas bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah telah disusun berdasarkan SPI yang memadai, tidak mempunyai wewenang untuk mengaudit atau menguji kelima unsur SPI secara mendetail.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Salah satu komponen LKPD adalah neraca yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP Nomor 71 Tahun 2010). Aset tetap merupakan unsur neraca yang mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan unsur neraca lainnya (Halim, 2014:305). Priyono (2013) juga menyatakan bahwa aset tetap merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka harus dikelola dengan baik dan benar.

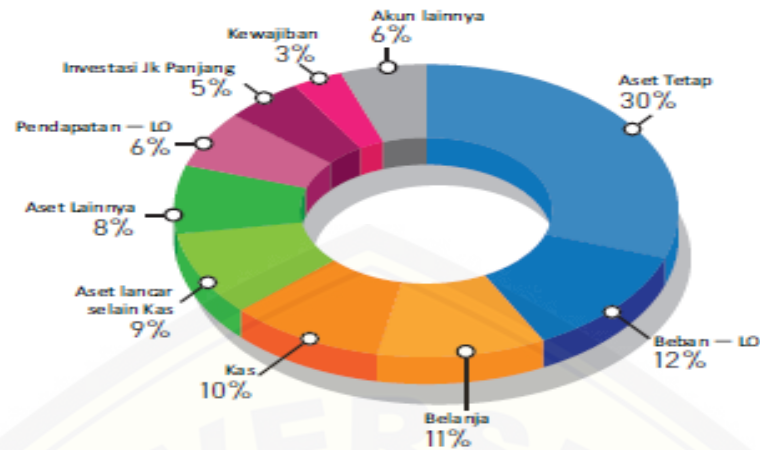
Aset tetap harus disajikan secara transparan dan akuntabel pada laporan keuangan maka perlu adanya penatausahaan aset tetap yang dilakukan berdasarkan prinsip SPI (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Sistem Pengendalian Intern yang memadai diharapkan akan meningkatkan efektifitas penatausahaan aset tetap. Penelitian Bleskadi (2015) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh secara signifikan terhadap penatausahaan aset tetap yang berarti peningkatan SPI akan meningkatkan ketertiban penatausahaan aset tetap. Penelitian Putra (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap.

Penatausahaan aset tetap harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset tetap. Penatausahaan aset tetap meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hasil penatausahaan aset tetap digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah daerah. Penatausahaan yang tertib

akan berdampak pada tersedianya database yang memadai sehingga menghasilkan laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat (DJPk, 2014). Penelitian Febrianti (2016) menemukan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian Simamora dan Halim (2012); Priyono (2013); dan Tangke *et al.* (2015) juga menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Aset tetap merupakan akun yang masih sering dikecualikan atau dianggap tidak wajar dalam opini LKPD. Permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap opini tergantung pada ada tidaknya pembatasan lingkup pemeriksaan, salah saji, tingkat materialitas yang digunakan, dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Opini merupakan suatu pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas SPI (Darise, 2009:378).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 BPK atas 533 LKPD Tahun 2015 mengungkapkan masih terdapat 221 LKPD belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) karena sebagian besar masih memiliki kelemahan dalam penyajian pelaporan keuangan sesuai SAP. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa aset tetap merupakan akun paling besar persentasenya dalam penyajian yang tidak sesuai dengan SAP dibandingkan akun lainnya. Permasalahan penyajian aset tetap tidak sesuai dengan SAP ini terjadi pada 188 pemerintah daerah, antara lain : a) pencatatan aset tetap belum didukung dengan daftar aset dan pencatatan dalam kartu inventaris barang yang valid dan informatif; b) terdapat selisih pencatatan antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai aset hasil konsolidasi dari seluruh SKPD; c) terdapat selisih mutasi tambah dan kurang aset tetap antara buku besar dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang tidak dapat dijelaskan; d) pengeluaran setelah perolehan awal tidak ditambahkan pada nilai aset tetap terkait melainkan dicatat sebagai aset baru; e) aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung bukti kepemilikan; f) aset tetap belum didukung pengamanan fisik yang memadai. (BPK RI, 2016). Hasil temuan BPK RI ini menunjukkan bahwa penyajian aset tetap yang tidak sesuai dengan SAP mengakibatkan laporan keuangan belum disajikan secara andal.



Gambar 1. 2 Akun yang disajikan tidak sesuai SAP pada LKPD Tahun 2015
(Sumber : BPK RI, 2016)

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban menyusun LKPD. Aset tetap merupakan komponen yang cukup besar dalam LKPD Kabupaten Bondowoso. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah aset tetap dan prosentase aset tetap dari total aset tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 relatif stabil, namun pada tahun 2015 persentasenya menurun menjadi 82,04% dari total aset. Hal ini terjadi karena tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalankan akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga harus menerapkan penyusutan aset tetap.

Tabel 1. 1 Jumlah aset tetap dan total aset tahun 2012-2015

Uraian	Jumlah			
	2012	2013	2014	2015
Aset Tetap (AT)	1.815.542.693.789	1.945.331.863.286	2.295.518.833.336	1.448.784.508.219
Total Aset (TA)	2.056.757.995.930	2.219.610.732.850	2.605.551.415.907	1.765.957.236.777
% AT dari TA	88,27 %	87,64 %	88,10 %	82,04 %

Sumber : LKPD Kabupaten Bondowoso *audited* 2013 -2016 (data diolah).

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 s/d 2015 pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penatausahaan aset yang dilakukan oleh SKPD belum tertib yaitu pembukuan/pencatatan sebagian aset tetap tanah belum informatif dan penyajian aset tetap belum lengkap dan andal. Permasalahan penatausahaan aset tetap tersebut disebabkan SKPD belum optimal dalam melakukan pengendalian atas pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap sehingga nilai aset tetap pada neraca belum disajikan secara andal (BPK RI, 2016).

Tabel 1.2 Kelemahan SPI terkait penatausahaan aset tetap

Tahun Anggran	Uraian
2012	a. Pencatatan aset tanah dalam KIB A (Tanah) belum dilengkapi informasi ukuran dan luas sebesar Rp. 4.792.077.845,- b. Aset peralatan mesin dan perlengkapan dengan kondisi rusak berat masih tercatat dalam KIB – B (Aset peralatan dan mesin) dan belum diproses secara memadai sebesar Rp.3.362.098.106,-
2013	Pada KIB A (Tanah) masih terdapat pencatatan sebidang tanah seluas 6.340 m2 bernilai 0 m2.
2014	Terdapat aset yang dicatat ganda (dobel) pada KIB sebesar Rp.25.500.213.500,-
2015	a. Aset peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp.1.754.226.980,- b. Terdapat aset tanah yang belum disajikan dalam KIB A senilai Rp.1.352.119.500,-

Sumber : LKPD Kabupaten Bondowoso *audited* tahun 2013 -2016 (data diolah).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya hasil penelitian yang beragam, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?
- b. Apakah SPI berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap?
- c. Apakah penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?
- d. Bagaimana komparasi pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menguji pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan.
- b. Untuk menguji pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap.
- c. Untuk menguji pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan.

- d. Untuk menganalisis komparasi pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan terkait penerapan konsep SPI pada sektor publik dan pelaporan keuangan daerah.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penerapan SPI pemerintah secara efektif, pelaksanaan penatausahaan aset secara tertib dan implikasinya terhadap keandalan laporan keuangan.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya SPI dalam pengelolaan dana APBD yang berimplikasi pada informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih andal.

- d. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan SPI, pengelolaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal menyatakan bahwa manajer (agen) atau perusahaan secara kualitatif memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak luar, maka sinyal atau hal-hal tertentu yang ditunjukkan oleh perusahaan (manajer) merupakan suatu tanda kualitas perusahaan (Gumanti, 2009). Perusahaan sebagai pihak yang mempunyai kelebihan informasi mempunyai dorongan untuk memberikan sinyal dalam bentuk informasi laporan keuangan pada pihak luar. Informasi laporan keuangan yang berkualitas merupakan cara perusahaan memberikan sinyal yang baik kepada pihak eksternal tentang kondisi dan kinerja keuangan entitas. Sinyal yang baik bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai nilai lebih/keunggulan kompetitif dari perusahaan lain.

Pada sektor publik, Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai agen dari masyarakat akan berusaha memberikan sinyal kepada publik dan pengguna laporan keuangan. Pemerintah memberikan sinyal kepada publik dengan cara dengan menyediakan laporan keuangan yang andal (Monika *et al.*, 2016). Keandalan laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang andal dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan yang semakin baik merupakan bentuk sinyal pemerintah kepada publik yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Sistem Pengendalian Intern yang efektif memberikan gambaran kepada para pengguna laporan keuangan bahwa kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan relatif kecil (Tresnawati dan Apandi, 2016). Pencatatan dan pemrosesan transaksi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keakuratan saldo akun dalam laporan keuangan. Efektifitas SPI meningkat menunjukkan bahwa catatan keuangan entitas dapat diandalkan serta aset entitas dapat dilindungi sehingga resiko salah saji dapat dihindari dan laporan keuangan yang disajikan lebih akurat. Jika SPI lemah maka informasi keuangan yang disajikan tidak akurat dan tidak dapat diandalkan.

2.2 Sistem Pengendalian Intern

2.2.1 Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal yang dikemukakan banyak penulis bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) sebagai inisiatif dari sekelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika (*American Accounting Assosiation*), *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*, Ikatan Akuntan Manajemen (*The Institute of Management Accountant*), and *the financial Executif Institute* (Diana dan Setiawati, 2011:83). Tahun 1992 COSO mengeluarkan laporan *Internal Control – Integrated Framework* yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok yang terkait dengan pengendalian internal. Laporan COSO diterima secara luas oleh manajemen entitas, auditor eksternal dan internal, akuntan manajemen, badan legeslatif dan pembuat peraturan. Pihak manajemen dan audit internal dari entitas yang berorientasi laba maupun nirlaba juga menggunakan laporan COSO untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi pengendalian internal.

Pada tahun 2013, COSO menerbitkan *Internal Control – Integrated Framework* sebagai revisi dari laporan tahun 1992. COSO mendefinisikan pengendalian internal yang dituangkan dalam (*Internal Control – Integrated Framework* (2013:2) : “*a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*” Definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.

COSO (2013) dalam *Internal Control—Integrated Framework* menyatakan tujuan dari pengendalian intern adalah :

- a. *Operations Objectives*
- b. *Reporting Objectives*
- c. *Compliance Objectives*

Arens *et al.* (2010:370) menyatakan bahwa pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian

yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sarannya. Kebijakan dan prosedur seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Menurut Arens *et al.* (2010:370) manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang pengendalian internal yang efektif adalah : reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi, dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai SPI yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai SPI pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengertian SPI menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 merupakan adaptasi dari COSO adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

2006 merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2014:253) SPI adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, intansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada didalamnya) didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan SPI untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan entitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan merupakan salah satu tujuan SPI, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak mungkin disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum jika SPI pada suatu entitas tidak memadai.

Konsep dasar yang terkandung dalam berbagai definisi tentang SPI tersebut adalah :

- a. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan merupakan suatu tujuan. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang terintegrasi dalam infrastruktur entitas.
- b. Sistem Pengendalian Intern hanya diharapkan untuk memberi keyakinan yang memadai bukan keyakinan penuh bagi entitas, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
- c. Sistem Pengendalian Intern merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu entitas yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efisiensi dan efektivitas operasi.

2.2.3 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa unsur-unsur SPI terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Setiap komponen meliputi sejumlah kebijakan dan prosedur

pengendalian yang diperlukan untuk mencapai tujuan entitas yaitu pelaporan, kesesuaian dan operasi (Jusuf, 2010:257). Berikut ini penjelasan untuk masing-masing komponen SPI tersebut :

a. Lingkungan Pengendalian (*Control environment*)

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua unsur pengendalian intern yang lain. Lingkungan pengendalian yang baik memberikan pengaruh yang baik pada suatu organisasi, dan sebaliknya jika lingkungan pengendalian yang tidak baik maka terdapat indikasi jalannya suatu organisasi tidak baik. Lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan dengan membangun suasana etis pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah dan dikomunikasikan di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Pimpinan instansi membina dan mendorong pentingnya nilai integritas dan etika dicapai melalui komunikasi lisan dalam rapat, diskusi dan keteladanan dalam kegiatan sehari-hari. Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan adanya program pelatihan dan pembimbingan untuk meningkatkan kompetensi pegawai (PP Nomor 60 Tahun 2008). Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas (Guy *et al.*, 2008: 230). Personel adalah merupakan aspek penting dari pengendalian intern. Jika para karyawan/pegawai kompeten dan dapat dipercaya diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal (Arens *et al.*, 2010 : 378).

Kepemimpinan yang kondusif dilakukan oleh pimpinan instansi dengan bersikap responsif dan ikut berperan terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk bagan yang secara tepat menggambarkan hubungan kewenangan dan pelaporan (Jusuf, 2010 : 260).

Pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan dalam instansi pemerintah. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah dilaksanakan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab secara jelas dan pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggungjawabnya.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilakukan dengan adanya promosi, renumerasi dan pemindahan pegawai didasarkan pada penilaian kinerja. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan dan aset SKPD harus didukung personel yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dilakukan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah. Mekanisme saling uji adalah mencocokkan data yang saling terkait dua atau lebih SKPD yang berbeda. Rekonsiliasi pengelolaan keuangan antara SKPD dengan Pejabat pengelola Keuangan daerah (PPKD) yang dilaksanakan secara periodik adalah bentuk hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

b. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*).

Semua entitas besar maupun kecil berorientasi laba maupun nirlaba akan menghadapi resiko, jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian resiko (*risk assesment*) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko - resiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Arens *et al.*, 2010: 379) dan Bastian (2014:259).

Manajemen menilai resiko sebagai bagian perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern untuk meminimalkan kekeliruan serta kecurangan (Arens *et al.*, 2010:379). Penilaian resiko harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan (Guy *et al.*, 2008:232). Menurut PP

Nomor 60 Tahun 2008 dan Bastian (2014:259) terdapat beberapa resiko dari faktor eksternal maupun internal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- 1) Adanya perubahan standar akuntansi baru
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang baru
- 3) Gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan
- 4) Tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai
- 5) Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan.

Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Penetapan tujuan instansi dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Perencanaan yang dibuat oleh instansi harus berdasarkan visi, misi dan tujuan instansi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa penilaian resiko mencakup:

- 1) Identifikasi resiko
Mengidentifikasi resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut yang bersumber dari faktor internal dan eksternal.
 - 2) Analisis resiko
Menentukan dampak resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.
- c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan sehingga mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas (Bastian, 2014:260). Kegiatan pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko.

Kegiatan pengendalian meliputi :

1) Pengendalian fisik atas aset;

Pengendalian fisik aset tetap dilakukan dengan : a) melekatkan identitas aset pada meubelair, peralatan dan inventaris kantor lainnya, b) akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, atau pengendalian fisik lainnya, c) dokumen sumber atau formulir diberi nomor urut tercetak (*prenumbered*) dan secara fisik diamankan.

2) Pemisahan fungsi;

Pemisahan fungsi dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi tidak dikendalikan oleh satu orang untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan, pemborosan dan kecurangan. Tanggungjawab dan untuk melaksanakan transaksi, pencatatan transaksi dan penyimpanan hasil transaksi harus dilaksanakan orang atau bagian yang berbeda.

3) Otorisasi atas transaksi dan kegiatan

Otorisasi atas transaksi penting untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang valid diproses dan dientri adalah transaksi yang telah diotorisasi dan hanya dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan lingkup otorisasinya.

4) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi

Transaksi diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai dan berguna dalam pengambilan keputusan.

5) Dokumentasi yang baik atas SPI dan transaksi

Terdapat dokumentasi atas SPI dan transaksi yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi sejak otorisasi, pemrosesan dan penyelesaian. Dokumentasi dipelihara dan tersedia setiap saat untuk diperiksa.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam entitas dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta melaksanakan pertanggungjawaban aktiva entitas tersebut (Arens *et al.*, 2010:384). Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan dan non keuangan. Informasi tersebut harus disampaikan

kepada pimpinan instansi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi keuangan dan anggaran disediakan secara memadai guna mendukung penyusunan pelaporan keuangan internal dan eksternal).

Komunikasi meyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggungjawab masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas laporan keuangan. Komunikasi berarti meyakinkan bahwa personil yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan mengerti bagaimana kegiatan dilakukan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan orang lain, baik dari dalam maupun luar entitas. Instansi pemerintah harus memastikan terjadinya komunikasi internal yang efektif dengan mengkomunikasikan secara jelas tugas yang dibebankan kepada masing-masing pegawai dan dimengerti oleh masing-masing pegawai instansi pemerintah.

e. *Aktivitas pemantauan (Monitoring Activities)*

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu (Bastian, 2014:260). Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Pemantauan secara berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi dan perbandingan data yang tercatat dengan aset fisiknya dan jika ada selisih dilakukan penelusuran. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

2.3 Keandalan Laporan Keuangan (*Reliability*)

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2010:12). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan berdasarkan SPI dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, komponen pokok LKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan yang disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi terdiri atas lima komponen yaitu : a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Neraca; c) Laporan Operasional (LO); d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berorientasi pada pengguna, maka laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang memadai (Lam dan Lau, 2014:24). Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ada empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Keandalan adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik (PP Nomor 71 Tahun 2010) :

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Salah satu tujuan dari SPI adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan agar berguna dalam pengambilan keputusan (Sari dan Witono, 2014). Setiap informasi keuangan yang tidak andal jarang ada yang bermanfaat. Reliabilitas (keandalan) sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Informasi keuangan dianggap andal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat serta bebas dari kesalahan dan bias. Daya uji (*variability*) ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen dengan metode pengukuran yang sama mendapatkan hasil yang serupa. Ketepatan penyajian (*representational faithfulness*) berarti bahwa angka-angka dan penjelasan laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. Netralitas (*neutrality*) berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan kelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar dan tidak bias (Kieso *et al.* 2008:37).

Menurut Bastian (2010:134) informasi andal adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*). Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan sehingga informasi dapat diandalkan. Laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas entitas pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi laporan keuangan harus lengkap dengan mempertimbangkan materialitas dan biaya sehingga dapat diandalkan.

2.4 Penatausahaan Aset Tetap

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, sehingga jumlahnya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas

operasi entitas. Aset tetap terdiri atas : a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan, d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Aktiva tetap merupakan aset/harta yang dimiliki organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk diperjualbelikan serta digunakan lebih dari satu tahun (periode akuntansi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi (Bastian, 2014:65). Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah merupakan bagian dari Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah (BMD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penatausahaan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertibnya penatausahaan aset tetap sekaligus mewujudkan pengelolaan aset tetap yang tertib, efektif, dan optimal. Hasil penatausahaan aset tetap digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahunnya. Kegiatan penatausahaan meliputi :

a. Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang menurut golongan dan kodifikasi barang. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pengguna barang ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. Aktiva tetap dicatat sesuai dengan klasifikasinya yaitu :

- 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
- 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
- 6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan
- 7) Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

b. Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang dan pengelola barang wajib melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) dalam 5 (lima) tahun. Berdasarkan kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan di catat serta didaftar dalam buku inventaris. Inventaris harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan.

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan penghitungan fisik barang daerah, meyakini kebenaran pemilikan serta kewajaran sesuai kondisi barang daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi dapat diketahui aset tetap yang benar-benar dimiliki pemerintah daerah, kemudian dilakukan penilaian sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Hasil penilaian aset tetap merupakan dukungan atas saldo aset dalam neraca (DJPK, 2014).

c. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana BMD pada pengguna barang dan pengelola barang. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengguna barang bertanggungjawab untuk menyusun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan dalam penguasaannya sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD. Pengelola barang menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran dan

tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya sebagai bahan penyusunan Laporan BMD, kemudian berdasarkan Laporan BMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Laporan Mutasi Barang. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan, kemudian Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang (DJPk, 2014).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Afiah dan Azwari (2015) yang dilakukan pada Kabupaten, Kota dan Propinsi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa SPI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Widyaningsih *et al.* (2011) juga menemukan bahwa SPI pada Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat berjalan sangat efektif sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Hal ini bertentangan dengan penelitian Karmila *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan disebabkan lemahnya pengendalian intern Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Penelitian Anggraeni dan Riduwan (2014) juga menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan disebabkan pelaksanaan SPI kurang optimal, kurang menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, serta kurang sesuai pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga implementasi SPI tidak dapat mendukung penyajian pelaporan keuangan yang andal.

Penelitian Febrianti (2016) dan Mukmin *et al.* (2015) menunjukkan bahwa penatausahaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Penelitian Simamora dan Halim (2012) menemukan bahwa kelemahan SPI dalam pengelolaan aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian berpengaruh terhadap saldo aset tetap sehingga mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Perbedaannya, penelitian Simamora dan Halim (2012) menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Hasil penelitian Bangun (2015) menunjukkan SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengelolaan aset tetap dapat memediasi hubungan antara SPI dengan kualitas laporan keuangan. Perbedaannya, penelitian Bangun (2015) menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen sedangkan dalam penelitian ini menggunakan keandalan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Beberapa penelitian lain disajikan pada lampiran 2.1.

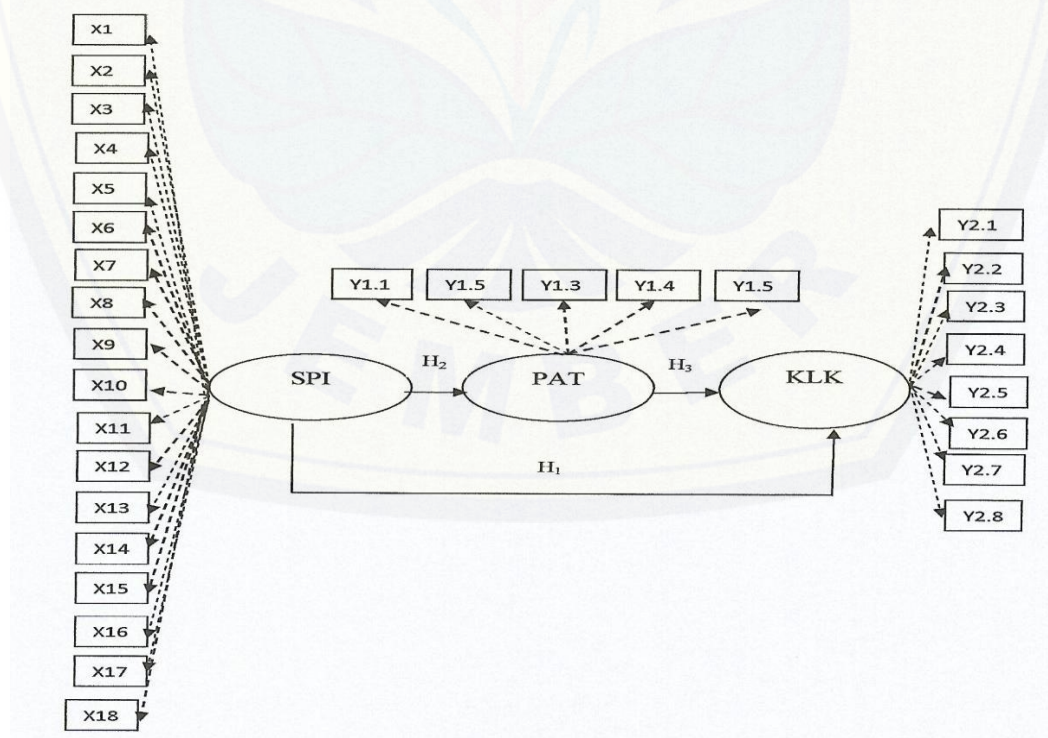
Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian tentang pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Penelitian ini ingin mengkaji ulang dan melakukan pengembangan penelitian sebelumnya dengan menambah penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening karena aset tetap merupakan akun yang jumlahnya signifikan dalam LKPD. Hasil pemeriksaan BPK RI atas 533 LKPD Tahun Anggaran 2015 juga mengungkapkan bahwa kelemahan SPI dan penyajian aset tetap yang tidak sesuai dengan SAP mempunyai pengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

2.6 Kerangka Konseptual

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah harus berpedoman pada prinsip SPI (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Pemerintah daerah merancang dan mengimplementasikan SPI yang efektif salah

satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keandalan LKPD. Keandalan informasi LKPD salah satunya ditentukan oleh keakuratan penyajian aset tetap maka perlu adanya penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan secara tertib. Penatausahaan aset tetap bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan aset tetap suatu entitas yang akurat dan informatif. Penatausahaan aset tetap merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah maka harus dilaksanakan berdasarkan prinsip SPI.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang SPI, penatausahaan aset tetap, dan keandalan laporan keuangan maka dapat disusun kerangka konseptual yang menjelaskan variabel-variabel yang berkedudukan sebagai variabel eksogen, variabel intervening, variabel endogen dan hubungan antar variabel tersebut. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini secara keseluruhan disajikan dalam Gambar 2.1. Kerangka konseptual menggambarkan pengaruh langsung antara variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap penatausahaan aset tetap (PAT) dan keandalan laporan keuangan (KLK), dan pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan. Pengaruh tidak langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan variabel intervening penatausahaan aset tetap.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual (Sumber : PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bangun (2015), Putra (2012))

Keterangan : \square : indikator variabel/ variabel terukur, \bigcirc : variabel laten
 \longrightarrow : pengaruh, $-\text{---}\longrightarrow$: indikator, H_1, H_2, H_3 : hipotesis penelitian, SPI : Sistem Pengendalian Intern, X_1 : keteladanan integritas dan nilai etika, X_2 : peningkatan kompetensi, X_3 : peran serta dalam pelaporan, X_4 : struktur organisasi, X_5 : pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, X_6 : promosi berdasarkan penilaian kinerja, X_7 : rekonsiliasi keuangan, X_8 : identifikasi resiko, X_9 : analisis resiko, X_{10} : melekatkan identitas pada aset tetap, X_{11} : pemisahan fungsi, X_{12} : otorisasi atas transaksi, X_{13} : klasifikasi transaksi, X_{14} : dokumentasi yang baik, X_{15} : penyediaan informasi, X_{16} : komunikasi pembebanan tugas, X_{17} : supervisi oleh atasan langsung, X_{18} : tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya, PAT : penatausahaan aset tetap, $Y_{1.1}$: pencatatan dalam Kartu Inventaris Brang (KIB), $Y_{1.2}$: pencatatan pada KIR, $Y_{1.3}$: inventarisasi, $Y_{1.4}$: pembuatan daftar mutasi aset, $Y_{1.1}$: pelaporan aset tetap, KLK : keandalan laporan keuangan, $Y_{2.1}$: penyajian jujur, $Y_{2.2}$: dapat diverifikasi, $Y_{2.3}$: penyajian neraca, $Y_{2.4}$: penyajian LRA, $Y_{2.5}$: penyajian Laporan Operasional, $Y_{2.6}$: penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), $Y_{2.7}$: penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), $Y_{2.8}$: netralitas.

2.7 Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015); Bangun (2015); dan Widyaningsih *et al.* (2011) menunjukkan SPI memiliki pengaruh langsung yang signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern yang terimplementasikan dengan efisien dan efektif akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Penelitian Simamora dan Halim (2012) menyimpulkan bahwa SPI merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap, dan penatausahaan aset tetap mempunyai pengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Hal ini berarti SPI berpengaruh secara tidak langsung terhadap keandalan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara optimal dalam proses penatausahaan aset tetap akan semakin meningkatkan keandalan LKPD.

Penelitian Bangun (2015) menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. SPI berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukkan

pengelolaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam memediasi hubungan SPI dengan kualitas laporan keuangan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris (Sugiono, 2014). Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

2.8.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari SPI, maka pemerintah daerah harus mendesain dan melaksanakan SPI yang baik dalam rangka meningkatkan keandalan informasi keuangan. Sistem Pengendalian Intern menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid (Sari dan Witono, 2014). Harrison *et al.* (2011:235) juga menyatakan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi merupakan informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan maka perlu adanya SPI yang layak untuk memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Hevesi dalam Afiah *et al.* (2015) menyatakan bahwa penyimpangan dan kesalahan penyajian masih ditemukan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa keuangan laporan tidak memenuhi karakteristik nilai keandalan informasi. Penyebab tidak dapat diandalkan dari laporan keuangan adalah masalah yang terkait dengan SPI.

Hasil penelitian Sari dan Witono (2014) menunjukkan bahwa penerapan SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Peningkatan

SPI memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015); Herawati (2014); Widyaningsih *et al.* (2011); dan Desmiyawati (2014) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

2.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Aset Tetap

Pengelolaan aset tetap adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penatausahaan aset tetap merupakan bagian dari pengelolaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan aset tetap yaitu dengan menyediakan data agar pengelolaan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan, efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai (DJPk, 2014). Pengelolaan aset tetap harus ditangani dengan baik agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga harus dilaksanakan berdasarkan SPI yang memadai (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Hal ini berarti SPI yang memadai akan mendorong pelaksanaan penatausahaan aset tetap secara tertib sehingga menghasilkan informasi aset daerah yang akurat.

Penelitian Bleskadit (2015) menunjukkan bahwa SPI mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengelolaan aset tetap, ini berarti peningkatan pengendalian intern akan meningkatkan pengelolaan aset tetap. Demikian sebaliknya penurunan pengendalian intern akan menurunkan proses kerja pengelolaan aset tetap daerah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap

2.8.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Salah satu masalah krusial yang dihadapi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyajikan laporan keuangan andal adalah berkaitan dengan penyajian akun aset tetap di neraca daerah, maka perlu adanya penatausahaan aset tetap. Pengelolaan aset tetap yang baik akan mewujudkan

laporan keuangan pemerintah yang baik (Simamora dan Halim, 2012). Keandalan merupakan bagian dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keandalan penyajian laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna, maka aset tetap harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam LKPD (Priyono, 2013). Salah satu lingkup bagian dari pengelolaan aset adalah penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP Nomor 27 Tahun 2014).

Penatausahaan aset tetap akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan berdampak pada laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga dapat diandalkan (DJPK, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap akan menentukan keandalan penyajian informasi aset tetap dalam LKPD.

Penelitian Tangke *et al.* (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap salah satunya berupa identifikasi dan inventarisasi nilai aset tetap memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keandalan laporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Simamora dan Halim (2012) dan Priyono (2013) menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha3 : Penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Dimiyati, 2009:75). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern (variabel independen) terhadap keandalan laporan keuangan (variabel dependen) dengan menggunakan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Respondennya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu kedalam beberapa strata. Setiap kelompok (strata) akan digunakan sebagai unit pemilihan sampel yang dilakukan secara random (Noor, 2015:152). Penelitian ini mengelompokkan SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian memilih SKPD secara random dengan alokasi proporsional pada setiap kelompok tersebut. SKPD yang terpilih akan mempunyai tiga calon responden. Langkah pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengelompokkan SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya
- b. Menghitung jumlah responden yang menjadi sampel dengan rumus Slovin

Teknik penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan ketentuan Slovin dengan nilai toleransi sebesar 5%. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Sanusi, 2011:101) :

$$n = \frac{N}{(1 + N \alpha^2)}$$

Keterangan : n = ukuran sampel, N = ukuran populasi, α = toleransi ketidakteelitian

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 164 responden, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel dalam penelitian ini minimal sebesar 118, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{164}{1 + (164 \times 0,05^2)}$$
$$n = \frac{164}{1,41} = 116,31 \approx 118$$

c. SKPD pada setiap kelompok dipilih secara random dengan alokasi proporsional

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian berupa hasil kuesioner yang berasal dari responden, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada SKPD yang terpilih sebagai sampel dan telah mengisi kuesioner. Data sekunder berupa data pendukung dari latar belakang permasalahan yang bersumber dari instansi terkait dan *website*.

Data sekunder dari instansi berupa data jumlah SKPD dan jumlah aparatur tahun 2017 yang terkait dengan penelitian, gambaran umum Kabupaten Bondowoso, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2013 – 2016 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Data sekunder yang bersumber dari *website* BPK RI berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI atas LKPD Tahun 2016.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan memberikan secara langsung sejumlah pernyataan tertulis secara berstruktur kepada responden berkaitan dengan tanggapannya terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Identifikasi Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi variabel independen (eksogen), variabel intervening dan variabel dependen (endogen). Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI), variabel intervening adalah penatausahaan aset tetap (PAT), dan variabel endogen adalah keandalan laporan keuangan (KLK).

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Definisi operasional penelitian dari variabel penelitian ini adalah :

a. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern adalah persepsi responden terhadap proses yang dijalankan oleh SKPD untuk memberi keyakinan memadai dalam upaya mencapai laporan keuangan yang andal. Variabel Sistem Pengendalian Intern diukur dengan menggunakan 18 indikator mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan penelitiannya Bangun (2015).

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel Sistem Pengendalian Intern adalah skala interval.

b. Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap adalah persepsi responden terhadap kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap pada SKPD. Variabel penatausahaan aset tetap diukur dengan menggunakan 5 indikator mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan penelitiannya Putra (2012).

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel penatausahaan aset tetap adalah skala interval.

c. Keandalan Laporan Keuangan

Keandalan laporan keuangan adalah persepsi responden bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, lengkap, dan dapat diverifikasi. Variabel keandalan laporan keuangan diukur dengan menggunakan 8 indikator mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel keandalan laporan keuangan adalah skala interval. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 kemudian indikator tersebut digunakan untuk menyusun item-item instrumen.

Tabel 3.1 Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	No. Kuisener
1	Variabel independen Sistem Pengendalian Intern (SPI)	1. Keteladanan integritas dan nilai etika	10.1
		2. Peningkatan kompetensi	11.1
		3. Peran serta dalam pelaporan	12.1
		4. Struktur organisasi	1.1
		5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	2.1
		6. Promosi berdasarkan penilaian kinerja	3.1
		7. Rekonsiliasi laporan keuangan dan anggaran	13.1
		8. Identifikasi Resiko	4.1
		9. Analisis Resiko	5.1
		10. Melekatkan identitas pada peralatan dan inventaris kantor	17.1
		11. Pemisahan fungsi	6.1
		12. Otorisasi atas transaksi	18.1
		13. Klasifikasi transaksi	19.1
		14. Dokumentasi yang baik	20.1
		15. Penyampaian informasi	7.1
		16. Komunikasi pembebanan tugas	8.1
		17. Supervisi oleh atasan langsung	14.1
		18. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan <i>review</i> lainnya	15.1
2	Variabel intervening penatausahaan aset tetap (PAT)	1. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Brang (KIB)	21.2
		2. Pencatatan pada KIR	22.2
		3. Inventarisasi	23.2
		4. Pembuatan daftar Mutasi barang	24.2
		5. Pelaporan	16.2
3	Variabel dependen keandalan laporan keuangan (KLK)	1. Penyajian jujur/wajar	25.3
		2. Dapat diverifikasi	26.3
		3. Penyajian Neraca	27.3
		4. Penyajian LRA	28.3
		5. Penyajian Laporan Operasional	29.3
		6. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas	30.3
		7. Penyajian Catatan atas Laporan keuangan (CaLK)	31.3
		8. Netralitas	9.3

Sumber : Berbagai peraturan dan karya ilmiah (diolah)

3.7 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen untuk mengetahui seberapa besar tingkat keakuratan dan konsistensi data yang dikumpulkan. Instrumen harus memenuhi dua persyaratan yaitu :

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) pada masing-masing variabel laten. Indikator-indikator dari suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai loading factor signifikan pada ($\alpha = 5\%$). Loading factor yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka *standardized loading estimate* harus memenuhi kriteria $\geq 0,5$.

Jadi item pertanyaan (indikator) yang memiliki nilai loading factor $\geq 0,5$ dapat dikatakan valid. Jika suatu indikator tidak valid atau memiliki nilai loading factor dibawah 0,5 maka harus dibuang dari analisis (Ghozali, 2014:138).

b. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut memperoleh hasil yang konsisten, instrumen ini dapat dipakai dengan aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Reliabilitas konstruk dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2014:233) :

$$\text{Construct Reliability} = \frac{(\sum \text{standardized loading})^2}{(\sum \text{standardized loading})^2 + \sum \epsilon_j}$$

Standar loading diperoleh langsung dari standardized loading untuk tiap indikator (dari perhitungan AMOS). ϵ_j adalah *measurement error* dari tiap-tiap indikator. *Measurement error* sama dengan 1- reliabilitas indikator yakni pangkat dua dari standardized loading setiap indikator yang dianalisis. Uji reliabilitas indikator dilakukan setelah dilakukan uji validitas, bila seluruh pertanyaan sudah valid baru dilakukan uji reliabilitas. *Construct Reliability* 0,70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan reliabilitas 0,60 – 0,70 masih dapat diterima dengan syarat validitas indikator dalam model baik (Ghozali, 2014:140). Jika suatu indikator tidak reliabel maka harus dibuang atau membuang responden yang menjawab tidak konsisten (Noor, 2015:235; Ghozali, 2016:52).

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*). Penggunaan *Structural Equation Modeling* (SEM) memungkinkan peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, mengkonfirmasi ketepatan model sekaligus menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Apabila telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada masing-masing variabel laten, maka langkah selanjutnya melakukan uji asumsi SEM.

3.8.1 Uji Asumsi *Structural Equation Modeling* (SEM)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai statistik z untuk *skewness* dan kurtosisnya dan secara empirik dapat dilihat *Critical Ratio* (CR) *skewness value*. Jika digunakan tingkat signifikan 5%, maka nilai CR yang berada diantara -1,96 sampai dengan 1,96 ($-1,96 \leq CR \leq 1,96$) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat.

b. Uji Multikolinieritas

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel eksogen sehingga uji multikolinieritas tidak digunakan dalam uji asumsi SEM.

c. Uji Outliers

Outliers adalah kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi. Deteksi terhadap multivariat outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai *mahalanobis distance*. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan nilai *Chi-square* pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada tingkatan signifikan $p < 0,05$. Kasus yang mempunyai nilai *mahalanobis distance* lebih besar dari *Chi-square* yang disyaratkan, maka kasus tersebut adalah *multivariate outliers* (Ghozali, 2014:227).

3.8.2 Uji Hipotesis

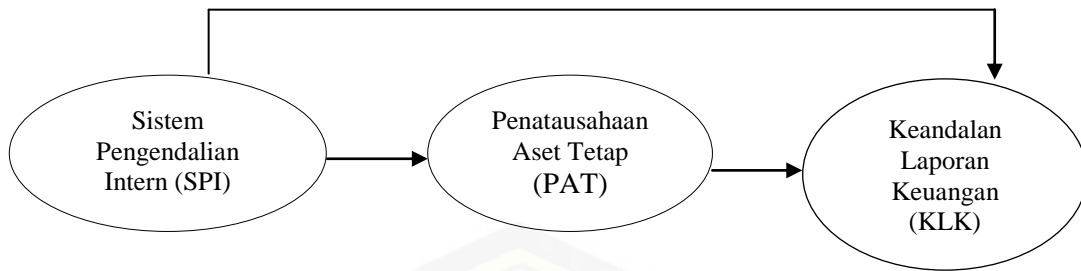
Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*). Langkah-langkah pemodelan SEM sebagai berikut (Ghozali, 2014:61; Dimiyati, 2009:101):

a. Pengembangan model berbasis teori

Model hubungan kausalitas antara Sistem Pengendalian Intern, penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan dimodelkan berdasarkan kajian teoritis tentang Teori Sinyal (*Signaling Theory*), SPI, penatausahaan aset tetap, keandalan laporan keuangan dan penelitian terdahulu.

b. Membentuk diagram jalur hubungan kausalitas

Langkah selanjutnya adalah membangun diagram jalur (*path diagram*), yang menunjukkan hubungan kausalitas antar konstruk sebagaimana Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram jalur

c. Menterjemahkan diagram jalur kedalam persamaan

Persamaan struktural dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) $PAT_i = \lambda_1 SPI_i + \zeta_1$
- 2) $KLK_i = \lambda_2 SPI_i + \zeta_2$
- 3) $KLK_i = \lambda_1 SPI_i + \beta PAT_i + \zeta_3$

Keterangan: SPI_i adalah Sistem Pengendalian Intern, KLK_i adalah keandalan laporan keuangan, PAT_i adalah penatausahaan aset tetap, ζ adalah *Measurement error*, λ dan β adalah koefisien jalur dari masing-masing variabel, λ_1 adalah hubungan langsung SPI_i terhadap PAT_i , λ_2 adalah hubungan langsung SPI_i terhadap KLK_i , β adalah hubungan langsung PAT_i terhadap KLK_i .

d. Evaluasi kriteria *Goodness of Fit*

Pengujian terhadap kelayakan model melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. Tabel 3.2 menunjukkan beberapa kriteria indeks kelayakan model dan *cut-off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak, yaitu :

Tabel 3.2 Uji kelayakan model

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cutt of Value</i>
<i>Chi Square</i>	Diharapkan kecil
<i>Significanse Probability</i>	$\geq 0,05$
RMSEA	$\leq 0,08$
GFI	$\geq 0,90$
AGFI	$\geq 0,90$
CMIN/DF	$\leq 2,00$
TLI	$\geq 0,95$
CFI	$\geq 0,95$

Sumber : Ferdinand (2002) sebagaimana dikutip Dimiyati (2009:105)

e. Uji Kausalitas

Uji kausalitas digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausalitas antar variabel. Kriteria yang digunakan adalah *Critical Ratio (CR)* yang identik

dengan uji t dalam pengujian regresi atau memperhatikan nilai probabilitasnya untuk masing-masing nilai *regression weight* kemudian dibandingkan dengan level signifikansi $\alpha = 0,01$. Hipotesis untuk persamaan struktural adalah sebagai berikut :

- a. Hipotesis pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan

Jika : $H_0 : \lambda_2 = 0$

$H_a : \lambda_2 \neq 0$

- b. Hipotesis pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap

Jika : $H_0 : \lambda_1 = 0$

$H_a : \lambda_1 \neq 0$

- c. Hipotesis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan

Jika : $H_0 : \beta = 0$

$H_a : \beta \neq 0$

- d. Kriteria

Kriteria yang digunakan adalah *Critical Ratio* (CR) atau probabilitas (P) pada tingkat signifikansi 1 % ($\alpha = 0,01$)

- e. Pengambilan Keputusan

Jika *Critical Ratio* (CR) $-2,58 \leq CR \leq 2,58$, atau $P \geq 0,01$, H_0 diterima. Hal ini berarti (a) SPI tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan, (b) SPI tidak berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap, (c) penatausahaan aset tetap tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Jika *Critical Ratio* (CR) $> 2,58$ atau $CR < -2,58$, atau $P \leq 0,01$, H_0 ditolak. Hal ini berarti (a) SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan, (b) SPI berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap, (c) penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

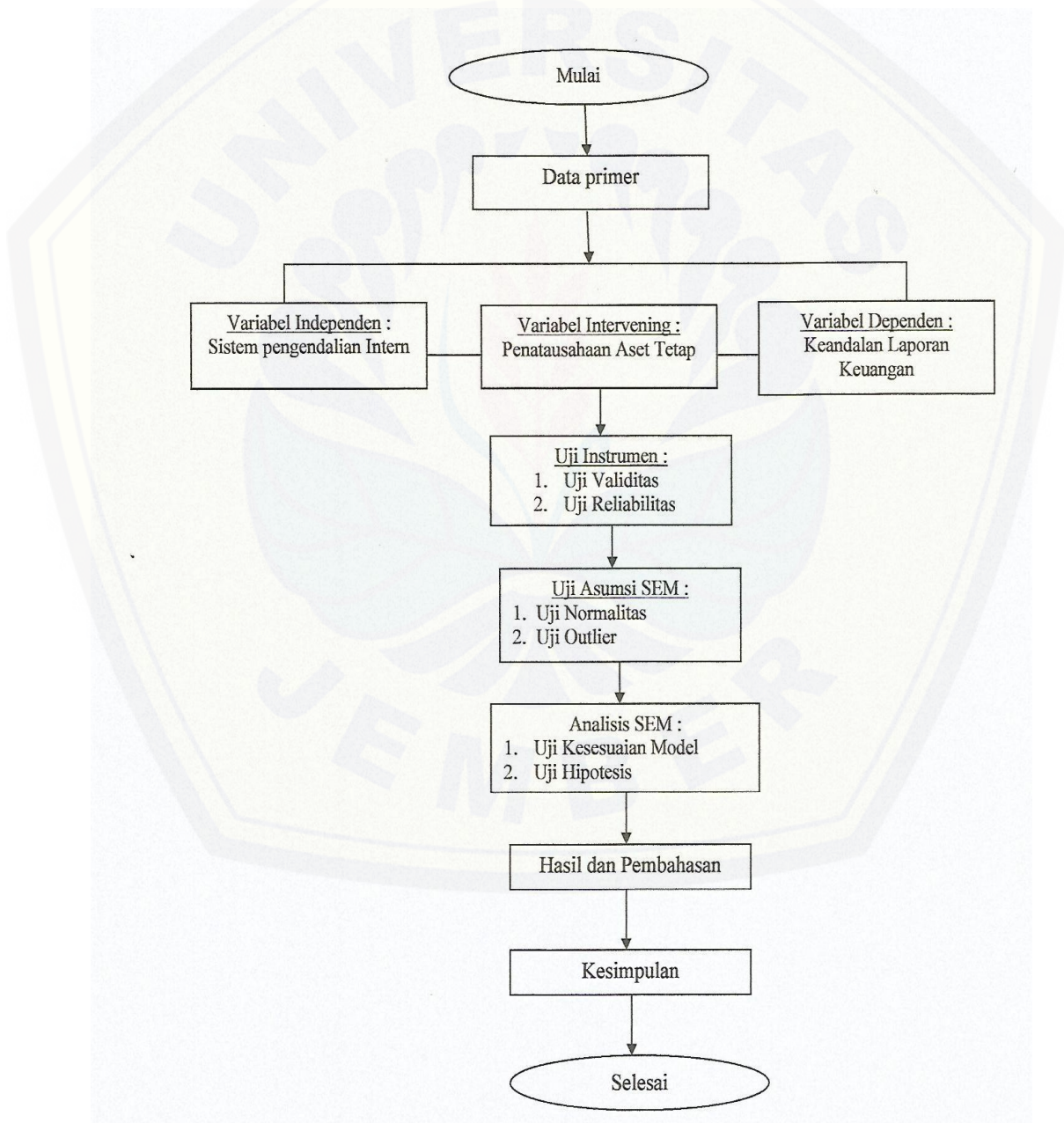
- f. Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan diagram jalur, dapat dilihat pengaruh langsung dan tidak langsung. Besarnya pengaruh langsung adalah semua koefisien dari masing-masing garis anak panah satu ujung. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan melalui penatausahaan aset tetap yang terdapat dalam satu model kausal yang sedang dianalisis. Besarnya pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Intern

terhadap keandalan laporan keuangan yaitu perkalian nilai koefisien jalur pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap penatausahaan aset tetap dengan nilai koefisien jalur penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan.

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, serta rangkaian metode penelitian, maka dapat disusun kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil ini membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan diterima. Hal ini berarti SPI yang memadai akan meningkatkan keandalan laporan keuangan dan Sistem Pengendalian yang lemah dapat menyebabkan laporan keuangan kurang dapat diandalkan. Temuan ini bermakna apabila pimpinan SKPD bersikap responsif dan berperan serta dalam proses pelaporan keuangan, adanya pemisahan fungsi, dan pegawai pengelola keuangan dan aset tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal akan meminimalisasi terjadinya salah saji dalam laporan keuangan sehingga akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini membuktikan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dan sejalan dengan hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015); Widyaningsih *et al.* (2011); Herawati (2014); Desmiyawati (2014); dan Sari dan Witono (2014).
- b. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap penatausahaan aset tetap. Hasil ini membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan SPI berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap diterima. Hal ini berarti penerapan SPI yang memadai akan mendorong pelaksanaan penatausahaan secara tertib, sebaliknya jika SPI semakin lemah maka pelaksanaan penatausahaan aset tetap kurang tertib. Temuan ini bermakna bahwa apabila pengendalian atas penggunaan aset tetap oleh kepala SKPD dilakukan secara optimal, bukti kepemilikan aset tetap yang lengkap, dan pendelegasian tugas dan tanggungjawab bagian pengelola aset tetap pada pegawai yang tepat akan mendorong pelaksanaan penatausahaan aset tetap secara tertib. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bleskadit (2015) dan Simamora dan Halim (2012).
- c. Penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil ini membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan

keuangan diterima. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan penatausahaan aset tetap akan semakin meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan sebaliknya jika pelaksanaan penatausahaan aset tetap kurang tertib maka informasi dalam laporan keuangan kurang dapat diandalkan. Temuan ini bermakna bahwa pembukuan aset tetap secara lengkap dan akurat, hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar penilaian aset tetap, dan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan lengkap dan tertib akan akan berdampak pada laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016); Simamora dan Halim (2012); Priyono (2013); dan Tangke (2015).

- d. Penatausahaan aset tetap mempunyai peranan yang lebih penting dalam menentukan keandalan laporan keuangan dibandingkan pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan. Hal ini berarti tertib atau tidaknya penatausahaan aset tetap akan sangat berdampak terhadap keandalan laporan keuangan maka diperlukan penerapan SPI yang memadai untuk mendorong pelaksanaan penatausahaan aset tetap secara tertib. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bangun (2015).

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini berimplikasi bagi :

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan akuntansi pemerintahan dan audit sektor publik khususnya tentang pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

- b. Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan ditingkat SKPD. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pengawasan intern, pembinaan penyelenggaraan SPI ditingkat SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan reuiu LKPD sebagai upaya meningkatkan keandalan LKPD dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh SPI terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari APBD. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat yang menerima dana hibah dan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar menerapkan SPI secara efektif dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut secara tertib, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana hibah dan bantuan sosial merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang disajikan dalam LKPD.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini berkaitan pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan ditingkat SKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan wawasan bagi peneliti lainnya terutama yang berminat dalam sistem akuntansi keuangan daerah dengan memperluas jumlah sampel pada beberapa pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan generalisasi yang lebih luas. Penelitian ini juga perlu dikembangkan lebih jauh lagi terutama pada sektor publik untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat dengan menambah variabel penelitian seperti kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N.N. dan P.C. Azwari. 2015. The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government In South Sumatera. *Global Conference on Business and Social Science*. 17-18 September 2015. *Procedia-Social and Behavioral Sciences Elsevier*: 811-818.
- Anggraeni, D.T. dan A. Riduwan. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 3 (3): 1-16.
- Arens, A.A., R.J. Elder, dan M.S. Beasley. 2010. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi 12. Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2013*. No.57.B/LHP/ XVIIIJATIM/05/2016
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012*. Nomor : 44B/LHP/ XVIIIJATIM/04/2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014*. No.80.B/LHP/ XVIIIJATIM/05/2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2016*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015*. No. 53.B/LHP/ XVIIIJATIM/ 05/2016.
- Bangun, V. 2015. Analisis Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.
- Bastian, I. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Bleskadit, E.B. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura. *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Desmiyawati. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan . *Jurnal Akuntansi*. 2(2): 163-178.
- Diana, A. dan L. Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Dimiyati, M. 2009. *Analisis SEM dalam Uji Pengaruh Beberapa Variabel terhadap Loyalitas*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Febrianti, S. 2016. Analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*: 1 (1).
- Ghozali, I. 2014. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 22.0*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariaete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gumanti, T.A. 2009. Teori Sinyal dalam manajemen. *Usahawan*. 6(38).
- Guy, D.M., C.W. Alderman, dan A.J. Winters, 2008. *Auditing*. Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Halim, A. dan M.S.Kusyufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harrison Jr, W.T., C.T. Hongren, C.W. Thomas, dan T. Suwardy. 2011. *Akuntansi Keuangan*. Edisi 8. Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Hendriyani, R. dan A.Tahar. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah propinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 22(1):25-33.
- Herawati, T. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research*. 11 (1).
- Ichlas, M., H. Basri, dan M. Arfan. 2014. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 3(4).
- Jusuf, A.H. 2010. *Auditing (Pengauditan)*. STIE-YKPN. Yogyakarta

- Karmila, A.R.Tanjung, dan E. Darlis. 2014. Pagaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*. 9(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). 2014. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Lam, N. dan P. Lau. 2014. *Akuntansi Keuangan. Intermediate Financial Reporting*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Manaf, I.A., M. Arfan, dan Darwanis. 2014. Pagaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat dan implikasinya terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kab/kota di provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 3(4).
- Monika, P., A.Syahroza, dan V. Diyanti. 2016. The Effect of Audit Opinion and Corruption on Local Government Performance. *Simposium Nasional Akuntansi 19*. Universitas Lampung.
- Mukmin, Darwanis, dan S. Abdullah. 2015. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. *Jurnal Magister Akuntansi*. 4(2).
- Mulyani, P. dan R. F. Suryawati. 2011. Analisis peran dan fungsi SPIP dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.7(2).
- Noor, J. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

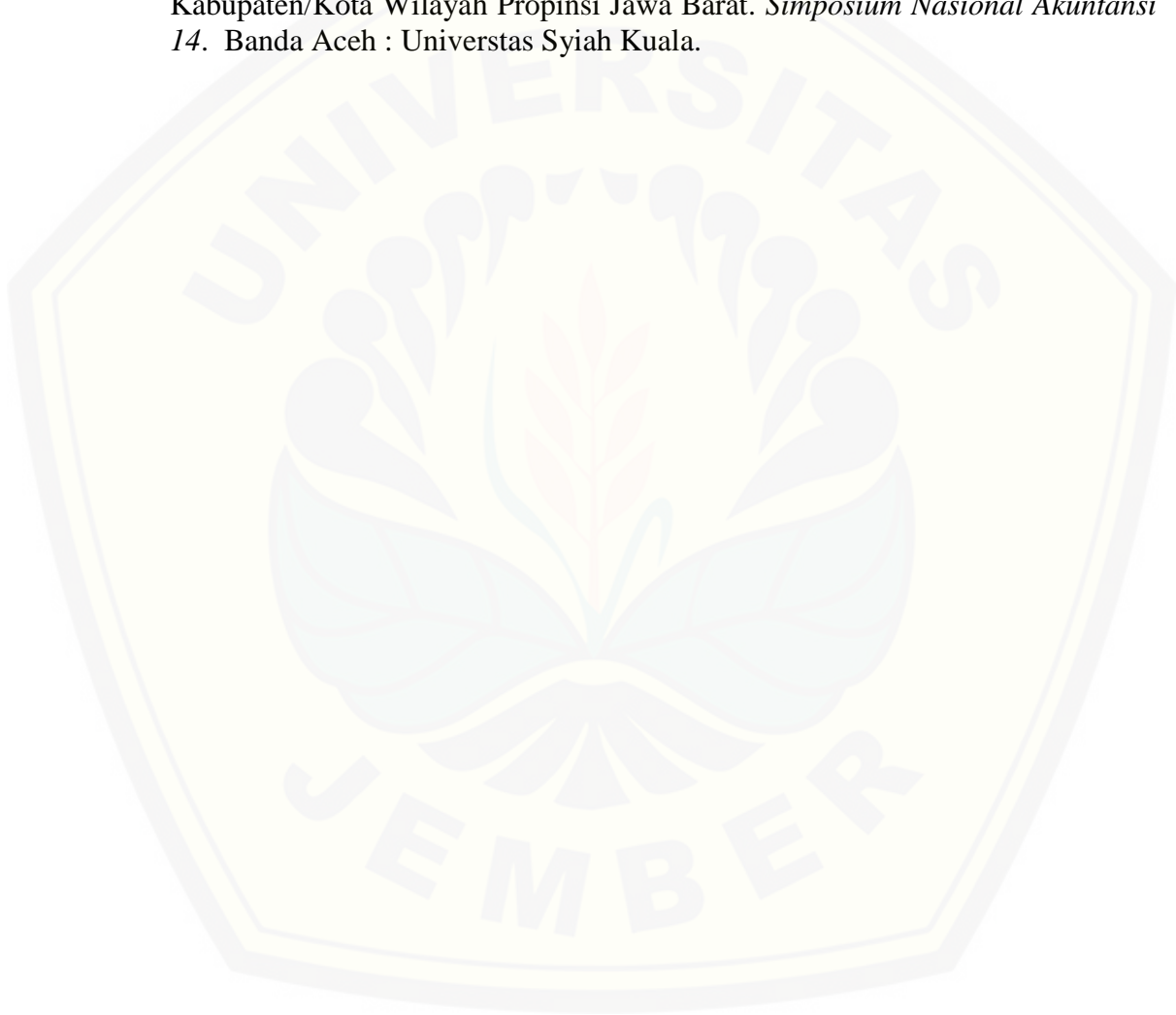
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Priyono, K. 2013. Keandalan informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual: Kajian pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi*. 4(1).
- Putra, A. 2012. Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten Sarolangun. *Tesis*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Romney, M.B. dan P.J. Steinbart. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, S. 2015. *Amos 22 untuk Structural Equation Modelling: Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, S.P. dan B. Witono. 2014. Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. *Seminar Nasional dan Call for Paper Research Methods and Organizational Studies*: 418-425.
- Simamora, R., dan Halim, A. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 10 (1).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwanda, D. 2015. Factors affecting quality of local government financial statements to get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(4).
- Tangke, J.G., Halim, dan G. Lucita. 2015. Pengaruh optimalisasi manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*. 21(1).
- The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control – Integrated Framework*. New York: AICPA Publication.
- Tresnawati, V. Dan R. N. N. Apandi. 2016. Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel moderating (Studi empiris pada Kementerian/Lambaga Republik Indonesia). *Jurnal Akuntansi Riset*. 5(2):1-12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*.

Widyaningsih, A., A. Triantoro, dan L.S. Wiyantoro. 2011. Hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan : Kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. *Simposium Nasional Akuntansi 14*. Banda Aceh : Universtas Syiah Kuala.



Lampiran 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
1	Tuti Herawati (2014)	Pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	Dependen : - Kualitas laporan keuangan Independen : - SPI	Analisis jalur	SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2	Nunuy Nur Afiah, Peny Cahaya Azwari (2015)	<i>The effect of implementation of Government Internal Control System (GICS) on the quality of financial reporting of the local government and its impact on principles of good governance : A research In District, City, and Provincial Government In South Sumatera</i>	Dependen : - Kualitas LKPD - Prinsip good governance Independen : - SPI	<i>Path analysis</i>	Penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap prinsip Good Governance, kualitas LKPD dapat memdiasi hubungan SPIP dengan prinsip Good Governance
3	Shinta Permata Sari dan Banu Witono (2014)	Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi	Dependen : - Keandalan dan ketepatan waktu Independen : - SDM - pengendalian internal - pemanfaatan TI	Regresi linier berganda	SDM, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan maupun ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah
4	Dian Anggraeni, Akhmad Riduwan, (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan daerah	Dependen : - Keandalan pelaporan keuangan Independen : - Kualitas SDM - Pengawasan keuangan - SPI - pemanfaatan TI	PLS (Partial Least Square)	Kualitas SDM dan pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah, pemanfaatan TI dan SPI tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
5	Iqlima Manaf, Muhammad Arfan, Darwanis (2014)	Pengaruh pemahaman SAP dan SPI terhadap proses reuiu LKPD oleh inspektorat dan implikasinya terhadap kualitas LKPD Kab/Kota di Propinsi Aceh	Dependen : - Proses reuiu LKPD - Kualitas laporan keuangan Independen : - Pemahaman SAP - SPI	Analisis jalur	Pemahaman SAP dan proses reuiu LKPD oleh inspektorat berpengaruh terhadap kualitas LKPD sedangkan pemahaman SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
6	Dadang Suwanda (2015)	<i>Factors affecting quality of local government financial statements to get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)</i>	Dependensi : - Kualitas LKPD Independensi : - Penerapan SAP - Kualitas SDM - Implementasi SPI - Komitmen organisasi - Pemanfaatan TI	Analisis regresi linier berganda	Kualitas SDM, implementasi SPI, dan pemanfaatan TI tidak berpengaruh signifikan, namun penerapan SAP dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD
7	Variana Bangun, (2015)	Analisis pengaruh SPIP, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota tebing Tinggi dengan pengelolaan barang milik daerah sebagai variabel intervening	Dependensi : - Kualitas laporan keuangan - Pengelolaan BMD Independensi : - SPI	Regresi linier sederhana dan Model Baron and Kenny, Uji Sobel.	SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan pengelolaan BMD dapat memediasi hubungan antara SPI dengan kualitas laporan keuangan.
8	Arisanti, Widyaningsih, A. Triantoro, L.S. Wiyantoro (2011)	Hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan: Kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening	Dependensi : - Kualitas laporan keuangan - Kualitas akuntabilitas keuangan Independensi : - Penerapan SAKD - SPI	Analisis jalur (<i>Path analysis</i>)	Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.
9	Karmila, Amries Rusli Tanjung, dan Edfan Darlis (2014)	Pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Propinsi Riau)	Dependensi : - Keterandalan laporan keuangan Independensi : - Kapasitas SDM - Pemanfaatan TI - Pengendalian intern	Analisis regresi berganda	Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, kapasitas SDM dan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
10	Desmiyawati (2014)	Faktor faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan	Dependensi : - Keandalan - Ketepatan waktu Independensi : - SDM - SPI - pengawasan keuangan - pemanfaatan TI	Regresi linier berganda	SDM, SPI dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan, pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan
11	Karnanto Priyono (2013)	Keandalan Informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual: Kajian pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Sampang		Analisis kualitatif	Pengelolaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga menghasilkan penyajian informasi aset tetap daerah yang belum andal

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
12	Mukmin, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2015)	Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD	Dependen : - Kinerja SKPD Independen : - SKAD - penatausahaan keuangan daerah - pengelolaan BMD	Analisis regresi berganda	Pemahaman SKAD tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kinerja SKPD
13	Ardiansyah Putra (2012)	Analisis pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BMD Pemkab Sarolangun	Dependen : - Pengelolaan BMD Independen : - Pembinaan, - Pengawasan - Pengendalian	Regresi linier berganda	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan BMD
14	Rudianto Simamora dan Abdul Halim (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan		Metode kualitatif dengan model analisis Miles and Huberman	Pengendalian intern merupakan factor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap dan penatausahaan aset tetap mempengaruhi kualitas laporan keuangan
15	Pujiani Mulyani dan Rindah F Suryawati (2011)	Analisis peran dan fungsi SPIP dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah		kualitatif deskriptif komparatif	SPI mempunyai peran dan fungsi yang signifikan dalam meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi
16	Sukma Febrianti (2016)	Analisis Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kubu Raya	Dependen : - Kualitas laporan keuangan Independen : - Penatausahaan aset	Regresi linier berganda	Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
17	John G.Tangke, Halim, dan Gina Lucita (2015)	Pengaruh optimalisasi manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar	Dependen : - Kualitas laporan keuangan Independen : Optimalisasi manajemen aset	Regresi linier berganda	Optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan
18	Elsye Beatrik Bleskadit (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempegaruhi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura	Dependen : inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian Independen : - Pengelolaan aset	Regresi linier berganda	Inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan aset tetap

Sumber : Berbagai jurnal penelitian (diolah).

Lampiran 4.1 Langkah Pengambilan Sampel

Langkah pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengelompokkan SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya

SKPD dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut :

Pengelompokan SKPD dan jumlah populasi

No.	Kelompok	Jumlah SKPD	Populasi (orang)
1	Sekretariat Daerah (Bagian)	8	1 x 3 = 3 7 x 2 = 14
2	Sekretariat DPRD	1	1 x 3 = 3
3	Inspektorat	1	1 x 3 = 3
4	Dinas	18	18 x 3 = 54
5	Badan	6	6 x 3 = 18
6	Kecamatan	23	23 x 2 = 69
	Total	57	164

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bondowoso

Jumlah populasi diperoleh dari jumlah aparatur yang terkait dengan variabel penelitian ini yang menjadi calon responden, setiap SKPD mempunyai tiga calon responden yang terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), bendahara pengeluaran dan pengurus barang.

- b. Menghitung jumlah responden yang menjadi sampel dengan rumus Slovin

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 164 responden, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel dalam penelitian ini minimal sebesar 118, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{164}{1 + (164 \times 0,05^2)}$$

$$n = \frac{164}{1,41} = 116,31 \approx 118$$

Pengambilan sampel (responden) tersebut dilakukan dengan memilih SKPD secara random, kemudian setiap SKPD terpilih mempunyai 3 calon responden, kecuali sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso terdiri atas 8 SKPD masing-masing hanya mempunyai bendahara pengeluaran dan pengurus barang dan

hanya satu SKPD yang mempunyai PPK. Jumlah SKPD yang terpilih sebanyak 40 SKPD dari 57 SKPD dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Minimal SKPD yang disampling} &= \frac{\text{jumlah calon responden}}{3 \text{ jabatan responden}} \\ &= \frac{118}{3} = 40 \text{ SKPD} \end{aligned}$$

- c. SKPD pada setiap kelompok dipilih secara random dengan alokasi proporsional dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi SKPD terpilih dan sampel responden

No.	Kelompok SKPD	Jumlah	SKPD terpilih	Sampel (Responden)
1	Sekretariat Daerah (Bagian)	8	$8/57 \times 40 = 6$	$5 \times 2 = 10$ $1 \times 3 = 3$
2	Sekretariat DPRD	1	1	$1 \times 3 = 3$
3	Inspektorat	1	1	$1 \times 3 = 3$
4	Dinas	18	$18/57 \times 40 = 13$	$13 \times 3 = 39$
5	Badan	6	$6/57 \times 40 = 4$	$4 \times 3 = 12$
6	Kecamatan	23	$23/57 \times 40 = 16$	$16 \times 3 = 48$
	Total	57	41 (pembulatan)	118 orang

Lampiran 4.2 Hasil Output SPSS Karakteristik Deskriptif Responden

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Jenis Kelamin	118	100,0%	0	0,0%	118	100,0%

Usia * Jenis Kelamin Crosstabulation

		Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
Usia	Count	2	0	2
	21 - 30 tahun	3,2%	0,0%	1,7%
	% within Jenis Kelamin			
	% of Total	1,7%	0,0%	1,7%
	Count	20	29	49
	31 - 40 tahun	31,7%	52,7%	41,5%
	% within Jenis Kelamin			
	% of Total	16,9%	24,6%	41,5%
	Count	27	12	39
	41 - 50 tahun	42,9%	21,8%	33,1%
	% within Jenis Kelamin			
	% of Total	22,9%	10,2%	33,1%
Count	14	14	28	
> 50 tahun	22,2%	25,5%	23,7%	
% within Jenis Kelamin				
% of Total	11,9%	11,9%	23,7%	
Count	63	55	118	
Total	% within Jenis Kelamin	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total	53,4%	46,6%	100,0%	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jabatan * Jenis Kelamin	118	100,0%	0	0,0%	118	100,0%

Jabatan * Jenis Kelamin Crosstabulation

		Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
PPK	Count	26	10	36
	% within Jenis Kelamin	41,3%	18,2%	30,5%
	% of Total	22,0%	8,5%	30,5%
Jabatan Bendahara Pengeluaran	Count	12	29	41
	% within Jenis Kelamin	19,0%	52,7%	34,7%
	% of Total	10,2%	24,6%	34,7%
Pengurus Barang	Count	25	16	41
	% within Jenis Kelamin	39,7%	29,1%	34,7%
	% of Total	21,2%	13,6%	34,7%
Total	Count	63	55	118
	% within Jenis Kelamin	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	53,4%	46,6%	100,0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jabatan * Pendidikan	118	100,0%	0	0,0%	118	100,0%

Jabatan * Pendidikan Crosstabulation

		Pendidikan				Total	
		SLTA	Diploma	S1	S2		
Jabatan	PPK	Count	0	0	13	23	36
		% within Pendidikan	0,0%	0,0%	30,2%	95,8%	30,5%
		% of Total	0,0%	0,0%	11,0%	19,5%	30,5%
	Bendahara Pengeluaran	Count	16	3	21	1	41
		% within Pendidikan	38,1%	33,3%	48,8%	4,2%	34,7%
		% of Total	13,6%	2,5%	17,8%	0,8%	34,7%
	Pengurus Barang	Count	26	6	9	0	41
		% within Pendidikan	61,9%	66,7%	20,9%	0,0%	34,7%
		% of Total	22,0%	5,1%	7,6%	0,0%	34,7%
	Total	Count	42	9	43	24	118
		% within Pendidikan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	35,6%	7,6%	36,4%	20,3%	100,0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jabatan * Masa Kerja	118	100,0%	0	0,0%	118	100,0%

Jabatan * Masa Kerja Crosstabulation

		Masa Kerja				Total	
		1 - 5 tahun	6 - 10 tahun	11 - 15 tahun	> 15 tahun		
Jabatan	PPK	Count	1	2	5	28	36
		% within Masa Kerja	33,3%	9,1%	15,2%	46,7%	30,5%
		% of Total	0,8%	1,7%	4,2%	23,7%	30,5%
	Bendahara Pengeluaran	Count	1	6	16	18	41
		% within Masa Kerja	33,3%	27,3%	48,5%	30,0%	34,7%
		% of Total	0,8%	5,1%	13,6%	15,3%	34,7%
	Pengurus Barang	Count	1	14	12	14	41
		% within Masa Kerja	33,3%	63,6%	36,4%	23,3%	34,7%
		% of Total	0,8%	11,9%	10,2%	11,9%	34,7%
Total	Count	3	22	33	60	118	
	% within Masa Kerja	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	2,5%	18,6%	28,0%	50,8%	100,0%	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jabatan * Bimtek	118	100,0%	0	0,0%	118	100,0%

Jabatan * Bimtek Crosstabulation

		Bimtek			Total	
		Tidak pernah	Pernah	Sering		
Jabatan	PPK	Count	16	16	4	36
		% within Bimtek	84,2%	39,0%	6,9%	30,5%
		% of Total	13,6%	13,6%	3,4%	30,5%
	Bendahara	Count	1	7	33	41
	Pengeluaran	% within Bimtek	5,3%	17,1%	56,9%	34,7%
		% of Total	0,8%	5,9%	28,0%	34,7%
	Pengurus	Count	2	18	21	41
	Barang	% within Bimtek	10,5%	43,9%	36,2%	34,7%
		% of Total	1,7%	15,3%	17,8%	34,7%
Total		Count	19	41	58	118
		% within Bimtek	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	16,1%	34,7%	49,2%	100,0%

Lampiran 4.3 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso

A. Demografi Responden

Nama SKPD :

Nama Responden (boleh tidak diisi) :

Usia :

JenisKelamin : Pria
 Wanita

Pendidikan terakhir : SLTA/Sedrajat
 Diploma (D3)
 Strata 1 (Sarjana)
 Starat 2 (Master)

Jabatan : PPK SKPD
 Bendahara Pengeluaran
 Pengurus Barang

Masa Kerja : 1 – 5 tahun
 6 – 10 tahun
 11 - 15 tahun
 \geq 15 tahun

Kursus/Diklat/Bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern atau pengelolaan aset tetap/ barang milik daerah yang telah bapak/ibu ikuti :

- Tidak pernah
 Pernah (sebutkan jumlahnya.....)
 Sering (sebutkan jumlahnya.....)

B. DAFTAR PERNYATAAN

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan pendapat yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, penatausahaan aset tetap dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kondisi pada SKPD/instansi Bapak/Ibu/Sdr.

Petunjuk Pengisian :

Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr. menilai pelaksanaannya, dengan memberi checklist (√) atau memilih salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi kerja saat ini.

Penilaian :

- 1 STS : Sangat Tidak Setuju
- 2 TS : Tidak Setuju
- 3 N : Netral
- 4 S : Setuju
- 5 SS : Sangat Setuju

Pernyataan		Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.1	Struktur organisasi pada instansi saya telah menggambarkan secara jelas hubungan dan jenjang pelaporan intern					
2.1	Wewenang dan tanggungjawab pada instansi saya telah diberikan kepada pegawai yang tepat, sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya					
3.1	Promosi pegawai pada instansi saya didasarkan pada penilaian kinerja					
4.1	Instansi saya telah mengidentifikasi resiko dari faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi					
5.1	Instansi saya telah melakukan analisis resiko untuk menentukan dampak resiko terhadap pencapaian tujuan instansi					
6.1	Instansi saya melakukan pemisahan tugas dan fungsi antara pegawai pengelola keuangan dengan pengurus barang					
7.1	Saya selalu menyampaikan informasi keuangan dan aset tetap kepada pimpinan instansi secara tepat waktu					
8.1	Tugas yang menjadi tanggungjawab saya telah dikomunikasikan secara jelas dan saya dapat melaksanakannya dengan baik					
9.3	Informasi dalam laporan keuangan instansi saya diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu					

Penilaian :

- 1 TP : Tidak Pernah
 2 HTP : Hampir Tidak pernah
 3 N : Netral
 4 S : Sering
 5 SS : Sangat Sering

Pernyataan		Alternatif Jawaban				
		TP	HTP	N	S	SS
		1	2	3	4	5
10.1	Pimpinan instansi saya memberi keteladanan tentang integritas dan nilai etika dalam kegiatan sehari-hari					
11.1	Pegawai bagian pengelola keuangan dan pengurus barang pada instansi saya mengikuti program pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi					
12.1	Pimpinan instansi saya ikut berperan dalam pelaporan yang berkaitan dengan keuangan					
13.1	Instansi saya melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan anggaran dengan PPKD/DPKA secara berkala					
14.1	Atasan langsung pengurus barang pada instansi saya mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pengurus barang					
15.1	Instansi saya menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK, Inspektorat, atau pengawas lainnya					
16.2	Instansi saya telah menyampaikan laporan aset tetap tiap semester dan tahunan kepada pengelola barang daerah					

Penilaian :

- 1 SSB : Sama Sekali Belum
 2 SK : Sebagian Kecil
 3 N : Netral
 4 SB : Sebagian Besar
 5 SS : Sudah Sepenuhnya

Pernyataan		Alternatif Jawaban				
		SSB	SK	N	SB	SS
		1	2	3	4	5
17.1	Instansi saya melekatkan identitas pada peralatan dan inventaris kantor					
18.1	Transaksi/data yang diproses dan dientri ke dalam komputer pada instansi saya telah diotorisasi oleh pegawai yang berwenang.					
19.1	Transaksi yang terjadi pada instansi saya diklasifikasikan secara tepat					
20.1	Dokumen atas transaksi pada instansi saya lengkap dan tersimpan dengan baik					
21.2	Pengurus barang pada instansi saya mencatat data aset tetap dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) sesuai dengan klasifikasinya secara lengkap					
22.2	Pengurus barang melakukan pencatatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) secara tertib berdasarkan letak barang menurut ruangan					
23.2	Pengurus barang mencatat hasil inventarisasi ke buku inventaris sesuai dengan kondisi barang daerah yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan					
24.2	Pengurus barang telah membuat daftar mutasi barang dan rekapitulasi daftar mutasi barang sebagai bahan penyusunan neraca SKPD					
25.3	Informasi dalam laporan keuangan pada instansi saya telah menyajikan transaksi secara jujur					
26.3	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pada instansi saya dapat diverifikasi/ditelusuri					
27.3	Instansi saya telah menyajikan neraca					
28.3	Instansi saya telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					
29.3	Instansi saya telah menyajikan Laporan Operasional (LO)					
30.3	Instansi saya telah menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)					
31.3	Instansi saya telah menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)					

Lampiran 4.4 Data Hasil Kuesioner

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28
1	4	3	3	5	4	1	4	3	3	4	3	4	3	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4
2	5	4	3	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4
3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5
4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4
5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4
6	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	5	4	4	3	4
7	5	5	5	5	5	4	5	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5
8	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5
9	4	4	5	5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
10	4	2	4	4	5	4	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5
11	3	5	3	4	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	2	4
12	3	5	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	2	4
13	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4
14	4	2	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4
15	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4
16	3	4	3	5	4	4	4	3	3	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
17	4	3	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4
18	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
19	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
20	4	2	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	3	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5
21	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4
23	4	1	3	4	3	2	4	2	1	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3
24	4	3	5	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5
25	5	4	4	4	5	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5
26	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28
27	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5
28	5	5	5	5	4	3	5	4	3	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
29	5	3	4	5	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	5
30	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5
31	3	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	5	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
32	5	3	5	4	3	3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	3	5	4	4	3	5
33	5	5	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	3
34	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	5	3	4	5	5	3	4	3	5	4	4	3	5
35	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	3	4	4	4	4	3	3	5	4	4	2	4
36	5	5	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	3	4
37	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	3	5	5	3	4	4	3	4	3	3	5	4	4	3	5
38	4	2	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5
39	5	4	5	4	5	5	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5
40	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	5	3	3	2	4
41	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
42	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	4	4	3	5	5	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	5	4	3	3	4
43	4	5	3	4	3	5	4	3	4	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	3	4	4	4	3	3	5	4	4	3	4
44	3	2	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4
45	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5
46	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5
47	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	5
48	5	5	5	4	5	4	5	3	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	3	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
49	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
50	3	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4
51	4	4	3	5	3	4	4	3	3	3	4	3	5	3	3	4	4	4	4	2	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	5
52	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5
53	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28
54	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4
55	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5
56	4	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
57	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	
58	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	5	3	5	4	4	4	
59	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4
60	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	5	
61	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	4	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	2	5
62	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
63	5	5	4	5	4	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	5	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4
64	3	4	3	5	4	4	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	3	3	4
65	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
66	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5
67	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	3	3
68	4	3	4	4	4	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4
69	4	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4
70	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	5	4	4	3	4
71	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	4	2	4
72	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	5	4	4	3	5
73	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	5	3	4	5	5	4	3	3	5	4	3	2	5
74	5	4	5	4	5	3	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4
75	5	4	4	4	5	3	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
76	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5
77	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	3	4	5	5	4	4	4	5	5	4	3	5
78	5	4	5	5	5	5	4	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5
79	4	3	4	5	4	4	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4
80	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28
81	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
82	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5
83	4	3	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5
84	3	4	3	5	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	3	4	5	3	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4
85	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
86	4	3	3	5	4	4	5	4	3	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	3	4
87	3	4	3	4	2	1	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	2	3	3	3	3	3	2	5	3	3	2	4
88	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
89	3	3	3	4	3	5	3	4	4	2	3	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	2	5
90	3	4	3	5	4	3	4	3	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
91	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4
92	3	2	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
93	4	4	4	5	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4
94	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	3	3	5	4	4	4	4
95	4	4	4	5	5	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	3	4	3	3	4	3	5	4	3	3	5
96	3	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4
97	2	3	2	4	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	4	2	2	4
98	4	3	3	5	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4
99	4	5	4	5	4	3	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5
100	4	4	4	5	4	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4
101	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
102	3	4	3	5	5	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
103	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
104	4	4	5	5	4	3	5	3	3	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	5	4	3	5
105	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y26	Y27	Y28
106	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4
107	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5
108	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	3	5
109	3	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
110	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	3	3	4
111	3	4	4	4	3	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	3	2	4
112	4	4	3	4	3	2	2	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4
113	4	3	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5
114	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	3	4
115	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4
116	4	3	4	4	4	2	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	4
117	3	4	2	4	4	2	4	3	2	4	3	3	4	3	4	4	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	5	4	3	2	4
118	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4

Lampiran 4.5 Hasil Output SPSS Frekuensi Variabel

Frequency Table**X1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	,8	,8	,8
3	29	24,6	24,6	25,4
Valid 4	59	50,0	50,0	75,4
5	29	24,6	24,6	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	,8	,8	,8
2	7	5,9	5,9	6,8
Valid 3	25	21,2	21,2	28,0
4	60	50,8	50,8	78,8
5	25	21,2	21,2	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	1,7	1,7	1,7
3	36	30,5	30,5	32,2
Valid 4	57	48,3	48,3	80,5
5	23	19,5	19,5	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	2	1,7	1,7	1,7
4	64	54,2	54,2	55,9
5	52	44,1	44,1	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	,8	,8	,8
3	22	18,6	18,6	19,5
4	72	61,0	61,0	80,5
5	23	19,5	19,5	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	2,5	2,5	2,5
2	8	6,8	6,8	9,3
3	38	32,2	32,2	41,5
4	56	47,5	47,5	89,0
5	13	11,0	11,0	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	,8	,8	,8
3	18	15,3	15,3	16,1
4	70	59,3	59,3	75,4
5	29	24,6	24,6	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	1,7	1,7	1,7
3	47	39,8	39,8	41,5
Valid 4	67	56,8	56,8	98,3
5	2	1,7	1,7	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	,8	,8	,8
2	8	6,8	6,8	7,6
Valid 3	66	55,9	55,9	63,6
4	43	36,4	36,4	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	,8	,8	,8
3	32	27,1	27,1	28,0
Valid 4	69	58,5	58,5	86,4
5	16	13,6	13,6	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	16	13,6	13,6	13,6
Valid 4	63	53,4	53,4	66,9
5	39	33,1	33,1	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	,8	,8	,8
3	25	21,2	21,2	22,0
Valid 4	65	55,1	55,1	77,1
5	27	22,9	22,9	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	,8	,8	,8
3	5	4,2	4,2	5,1
Valid 4	62	52,5	52,5	57,6
5	50	42,4	42,4	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	23	19,5	19,5	19,5
Valid 4	80	67,8	67,8	87,3
5	15	12,7	12,7	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	9	7,6	7,6	7,6
Valid 4	82	69,5	69,5	77,1
5	27	22,9	22,9	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	14	11,9	11,9	11,9
4	74	62,7	62,7	74,6
5	30	25,4	25,4	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	2,5	2,5	2,5
3	35	29,7	29,7	32,2
4	68	57,6	57,6	89,8
5	12	10,2	10,2	100,0
Total	118	100,0	100,0	

X18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	14	11,9	11,9	11,9
4	78	66,1	66,1	78,0
5	26	22,0	22,0	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	6	5,1	5,1	5,1
4	70	59,3	59,3	64,4
5	42	35,6	35,6	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	4	3,4	3,4	3,4
3	33	28,0	28,0	31,4
Valid 4	73	61,9	61,9	93,2
5	8	6,8	6,8	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	4	3,4	3,4	3,4
3	41	34,7	34,7	38,1
Valid 4	65	55,1	55,1	93,2
5	8	6,8	6,8	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	6	5,1	5,1	5,1
Valid 4	72	61,0	61,0	66,1
5	40	33,9	33,9	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	21	17,8	17,8	17,8
Valid 4	67	56,8	56,8	74,6
5	30	25,4	25,4	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	24	20,3	20,3	20,3
4	71	60,2	60,2	80,5
5	23	19,5	19,5	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	28	23,7	23,7	23,7
4	76	64,4	64,4	88,1
5	14	11,9	11,9	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	1,7	1,7	1,7
3	38	32,2	32,2	33,9
4	66	55,9	55,9	89,8
5	12	10,2	10,2	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	30	25,4	25,4	25,4
5	88	74,6	74,6	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	7	5,9	5,9	5,9
4	73	61,9	61,9	67,8
5	38	32,2	32,2	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	,8	,8	,8
3	25	21,2	21,2	22,0
4	69	58,5	58,5	80,5
5	23	19,5	19,5	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	14	11,9	11,9	11,9
3	55	46,6	46,6	58,5
4	40	33,9	33,9	92,4
5	9	7,6	7,6	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Y28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	5	4,2	4,2	4,2
4	61	51,7	51,7	55,9
5	52	44,1	44,1	100,0
Total	118	100,0	100,0	

Lampiran 4.6 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Sistem Pengendalian Intern Tahap 1 dengan program AMOS 5.0

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X18 <--- X	1,000				
X17 <--- X	2,126	,607	3,503	***	par_1
X16 <--- X	1,294	,422	3,066	,002	par_2
X15 <--- X	1,057	,362	2,918	,004	par_3
X14 <--- X	1,665	,489	3,403	***	par_4
X13 <--- X	1,349	,443	3,045	,002	par_5
X12 <--- X	2,560	,712	3,598	***	par_6
X11 <--- X	1,870	,558	3,351	***	par_7
X10 <--- X	1,960	,574	3,415	***	par_8
X9 <--- X	1,332	,444	2,999	,003	par_9
X8 <--- X	1,147	,389	2,949	,003	par_10
X7 <--- X	2,011	,585	3,436	***	par_11
X6 <--- X	1,710	,591	2,892	,004	par_12
X5 <--- X	2,106	,600	3,510	***	par_13
X4 <--- X	,788	,318	2,478	,013	par_14
X3 <--- X	2,562	,716	3,576	***	par_15
X2 <--- X	1,353	,528	2,562	,010	par_16
X1 <--- X	2,415	,686	3,522	***	par_17

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X18 <--- X	,351
X17 <--- X	,646
X16 <--- X	,438
X15 <--- X	,401
X14 <--- X	,595
X13 <--- X	,449
X12 <--- X	,749
X11 <--- X	,576
X10 <--- X	,611
X9 <--- X	,431
X8 <--- X	,414
X7 <--- X	,620
X6 <--- X	,397
X5 <--- X	,658
X4 <--- X	,301
X3 <--- X	,698
X2 <--- X	,322
X1 <--- X	,671

Lampiran 4.7 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Sistem Pengendalian Intern Tahap II dengan program AMOS 5.0 dan Perhitungan Reliabilitas

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X17 <--- SPI	1,000				
X14 <--- SPI	,762	,141	5,389	***	par_1
X12 <--- SPI	1,207	,181	6,652	***	par_2
X11 <--- SPI	,893	,163	5,465	***	par_3
X10 <--- SPI	,989	,168	5,895	***	par_4
X7 <--- SPI	,923	,163	5,650	***	par_5
X5 <--- SPI	1,000	,168	5,959	***	par_6
X3 <--- SPI	1,211	,188	6,459	***	par_7
X1 <--- SPI	1,224	,186	6,580	***	par_8

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X17 <--- SPI	,645
X14 <--- SPI	,578
X12 <--- SPI	,749
X11 <--- SPI	,584
X10 <--- SPI	,655
X7 <--- SPI	,604
X5 <--- SPI	,663
X3 <--- SPI	,700
X1 <--- SPI	,722

Perhitungan Reliabilitas Konstruk Sistem Pengendalian Intern

No	Variabel	Standar loading	Standar loading ²	Kesalahan pengukuran (ϵ_j)	$(\sum \text{standar loading})^2$	$(\sum \text{standar loading})^2 + \sum \epsilon_j$	Reliabilitas Konstruk
1	X1	0,722	0,521	0,479			
2	X3	0,700	0,490	0,510			
3	X5	0,663	0,440	0,560			
4	X7	0,604	0,365	0,635			
5	X10	0,655	0,429	0,571			
6	X11	0,584	0,341	0,659			
7	X12	0,749	0,561	0,439			
8	X14	0,578	0,334	0,666			
9	X17	0,645	0,416	0,584			
	Jumlah	5,900	3,897	5,103	34,81	39,913	0,872

Lampiran 4.8 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Penatausahaan Aset
Tetap Tahap 1 dengan program AMOS 5.0

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y11 <--- Y1	1,000				
Y12 <--- Y1	,555	,168	3,303	***	par_1
Y13 <--- Y1	1,271	,191	6,656	***	par_2
Y14 <--- Y1	,997	,163	6,122	***	par_3
Y15 <--- Y1	1,196	,192	6,217	***	par_4

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y11 <--- Y1	,694
Y12 <--- Y1	,339
Y13 <--- Y1	,754
Y14 <--- Y1	,700
Y15 <--- Y1	,712

Lampiran 4.9 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Penatausahaan Aset Tetap Tahap II dengan program AMOS 5.0 dan Perhitungan Reliabilitas

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y11 <--- Y1	1,000				
Y13 <--- Y1	1,337	,203	6,595	***	par_1
Y14 <--- Y1	1,026	,170	6,029	***	par_2
Y15 <--- Y1	1,229	,201	6,114	***	par_3

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y11 <--- Y1	,675
Y13 <--- Y1	,771
Y14 <--- Y1	,701
Y15 <--- Y1	,712

Perhitungan Reliabilitas Konstruk Penatausahaan Aset Tetap							
No	Variabel	Standar loading	Standar loading ²	Kesalahan pengukuran (ε _j)	(∑ standar loading) ²	(∑ standar loading) ² + ∑ε _j	Reliabilitas Konstruk
1	Y11	0,675	0,456	0,544			
2	Y13	0,771	0,594	0,406			
3	Y14	0,701	0,491	0,509			
4	Y15	0,712	0,507	0,493			
	Jumlah	2,859	2,048	1,952	8,174	10,125	0,807

Lampiran 4.10 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruksi Keandalan Laporan Keuangan Tahap I dengan program AMOS 5.0

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y21 <--- KLK	1,000				
Y22 <--- KLK	,814	,149	5,473	***	par_1
Y23 <--- KLK	1,291	,176	7,325	***	par_2
Y24 <--- KLK	,452	,107	4,228	***	par_3
Y25 <--- KLK	1,112	,154	7,226	***	par_4
Y26 <--- KLK	1,382	,184	7,516	***	par_5
Y27 <--- KLK	1,640	,218	7,512	***	par_6
Y28 <--- KLK	,453	,140	3,234	,001	par_7

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y21 <--- KLK	,644
Y22 <--- KLK	,566
Y23 <--- KLK	,803
Y24 <--- KLK	,421
Y25 <--- KLK	,808
Y26 <--- KLK	,847
Y27 <--- KLK	,843
Y28 <--- KLK	,323

Lampiran 4.11 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Keandalan Laporan Keuangan Tahap II dengan program AMOS 5.0 dan Perhitungan Reliabilitas

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

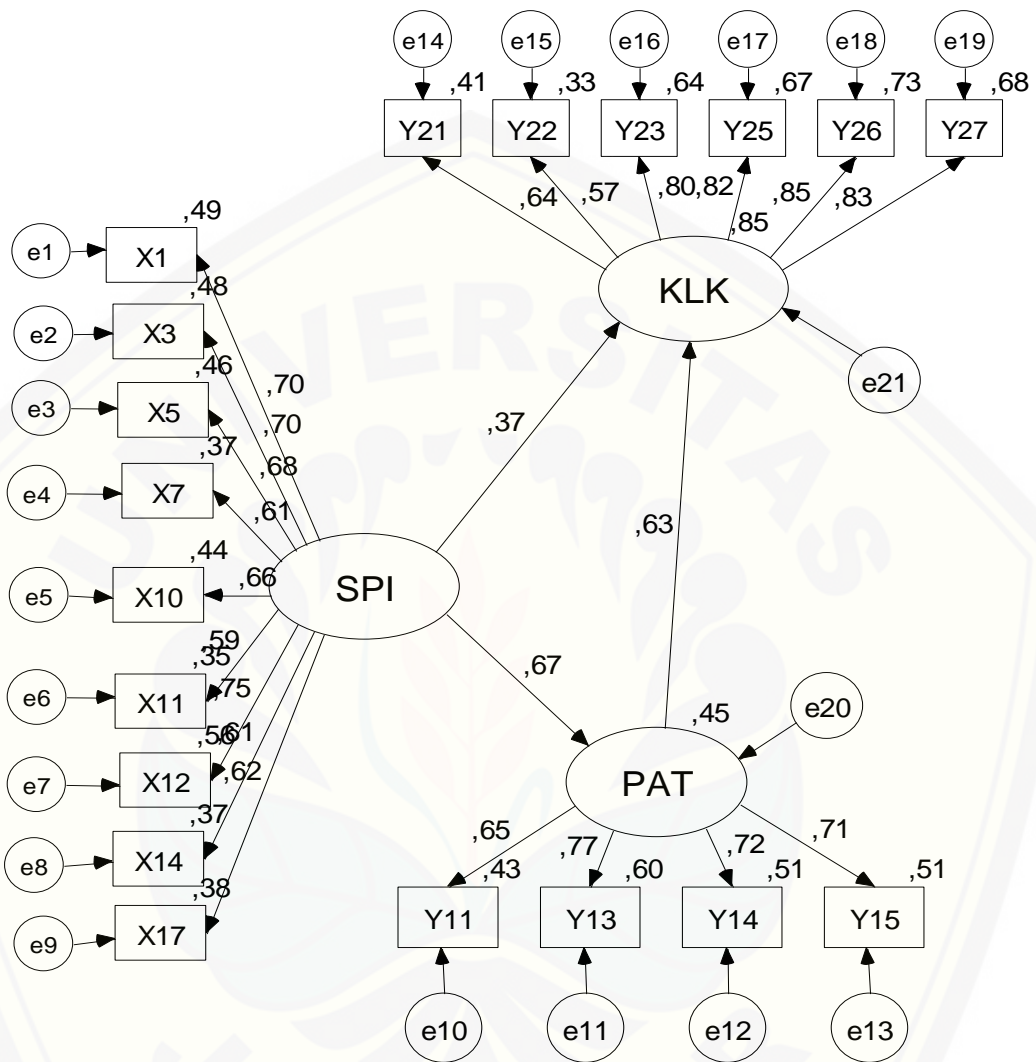
	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y21 <--- KLK	1,000				
Y22 <--- KLK	,818	,151	5,417	***	par_1
Y23 <--- KLK	1,315	,180	7,300	***	par_2
Y25 <--- KLK	1,114	,157	7,112	***	par_3
Y26 <--- KLK	1,391	,187	7,419	***	par_4
Y27 <--- KLK	1,657	,223	7,433	***	par_5

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y21 <--- KLK	,638
Y22 <--- KLK	,564
Y23 <--- KLK	,811
Y25 <--- KLK	,802
Y26 <--- KLK	,845
Y27 <--- KLK	,845

Perhitungan Reliabilitas Konstruk Keandalan Laporan Keuangan							
No	Variabel	Standar loading	Standar loading ²	Kesalahan pengukuran (ε _j)	(∑ standar loading) ²	(∑ standar loading) ² + ∑ε _j	Reliabilitas Konstruk
1	Y21	0,638	0,407	0,593			
2	Y22	0,564	0,318	0,682			
3	Y23	0,811	0,658	0,342			
4	Y25	0,802	0,643	0,357			
5	Y26	0,845	0,714	0,286			
6	Y27	0,845	0,714	0,286			
	Jumlah	4,505	3,454	2,546	20,295	22,841	0,889

Lampiran 4.12 Hasil Analisis SEM dengan program AMOS 5.0



Goodness of Fit : ,905
 Chi Square : 120,953
 Probability : ,955
 Degree of Freedom : 149
 Chi Square/Degree of Freedom : ,812
 AGFI : ,879
 RMSEA : ,000
 TLI : 1,032
 CFI : 1,000

Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X10	2,000	5,000	-,033	-,145	-,256	-,567
Y11	3,000	5,000	-,059	-,263	-,605	-1,342
Y13	2,000	5,000	-,215	-,952	-,042	-,092
Y14	3,000	5,000	-,006	-,026	-,543	-1,205
Y15	3,000	5,000	-,078	-,346	-,668	-1,482
Y27	2,000	5,000	,164	,729	-,384	-,851
Y26	2,000	5,000	-,137	-,609	-,236	-,524
Y25	3,000	5,000	-,009	-,040	-,448	-,994
Y23	2,000	5,000	-,050	-,221	-,196	-,434
Y22	3,000	5,000	,024	,104	-,184	-,408
Y21	3,000	5,000	,007	,029	-,489	-1,085
X17	2,000	5,000	-,204	-,903	,021	,046
X14	3,000	5,000	-,016	-,072	,101	,224
X12	2,000	5,000	-,156	-,690	-,441	-,979
X11	3,000	5,000	-,224	-,995	-,730	-1,619
X7	2,000	5,000	-,261	-1,156	-,024	-,052
X5	2,000	5,000	-,182	-,808	-,012	-,026
X3	2,000	5,000	-,016	-,069	-,664	-1,473
X1	2,000	5,000	-,108	-,479	-,739	-1,639
Multivariate					-8,781	-1,688

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
80	28,865	,068	1,000
112	28,600	,073	,999
102	28,441	,075	,995
28	27,893	,086	,992
18	27,770	,088	,981
73	27,733	,089	,956
61	27,660	,090	,916
31	27,396	,096	,887
97	27,019	,104	,877
87	26,871	,108	,829
5	26,604	,114	,803
40	26,385	,120	,768
7	26,381	,120	,670
83	25,402	,148	,847
89	25,391	,148	,776
14	25,316	,150	,712
32	25,266	,152	,634
79	25,160	,155	,572
86	25,079	,158	,502
24	24,947	,162	,454
104	24,734	,169	,441
65	24,454	,179	,457
41	24,428	,180	,375
76	24,127	,191	,406
22	23,596	,212	,539
2	23,234	,227	,606
13	23,097	,233	,579
66	23,006	,237	,533
52	22,877	,243	,505
95	22,852	,244	,432
58	22,400	,265	,556
33	22,109	,279	,608
37	22,077	,280	,542
50	21,902	,289	,544
12	21,713	,299	,555
44	21,092	,332	,760
35	20,756	,350	,825
117	20,622	,358	,819
96	20,176	,384	,903
114	19,910	,400	,927

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
34	19,846	,404	,911
63	19,806	,406	,887
23	19,732	,411	,869
107	19,723	,411	,827
85	19,615	,418	,816
42	19,444	,429	,828
110	19,372	,433	,804
53	19,186	,445	,823
69	19,185	,445	,771
39	18,954	,460	,810
82	18,918	,462	,771
88	18,780	,471	,774
60	18,759	,472	,725
100	18,596	,483	,740
27	18,551	,486	,699
38	18,301	,502	,757
10	18,287	,503	,703
49	18,259	,505	,651
93	18,071	,518	,684
17	18,021	,521	,643
111	18,005	,522	,582
116	17,965	,525	,532
8	17,919	,528	,485
74	17,870	,531	,440
26	17,827	,534	,393
19	17,732	,540	,375
106	17,641	,547	,356
59	17,609	,549	,306
81	17,521	,555	,287
25	17,242	,573	,368
55	17,204	,576	,320
84	17,190	,577	,263
21	17,185	,577	,208
29	17,120	,582	,183
45	17,077	,585	,152
57	16,838	,601	,194
67	16,733	,608	,185
109	16,618	,616	,180
54	16,556	,620	,155
36	16,375	,632	,175
71	16,333	,635	,143
70	16,313	,636	,109
77	16,262	,640	,088
16	16,255	,640	,062

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
72	16,085	,652	,069
92	16,037	,655	,053
48	16,032	,655	,035
99	15,949	,661	,030
78	15,734	,675	,039
56	15,527	,689	,048
20	15,461	,693	,038
15	15,317	,702	,038
68	15,274	,705	,027
101	15,111	,716	,029
108	15,105	,716	,018
3	15,066	,718	,012
94	14,961	,725	,010
103	14,803	,735	,010
43	14,734	,739	,007
91	14,533	,752	,008

Estimates (Group number 1 - Default model)**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)****Maximum Likelihood Estimates****Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PAT <--- SPI	,617	,116	5,304	***	par_18
KLK <--- SPI	,294	,087	3,374	***	par_16
KLK <--- PAT	,552	,116	4,769	***	par_19
X1 <--- SPI	1,000				
X3 <--- SPI	1,014	,145	6,986	***	par_1
X5 <--- SPI	,859	,129	6,655	***	par_2
X7 <--- SPI	,781	,128	6,109	***	par_3
X11 <--- SPI	,767	,128	6,009	***	par_4
X12 <--- SPI	1,015	,139	7,320	***	par_5
X14 <--- SPI	,675	,111	6,057	***	par_6
X17 <--- SPI	,805	,129	6,257	***	par_7
Y22 <--- KLK	,822	,147	5,580	***	par_8
Y23 <--- KLK	1,287	,174	7,407	***	par_9
Y25 <--- KLK	1,123	,151	7,416	***	par_10
Y26 <--- KLK	1,392	,181	7,698	***	par_11
Y27 <--- KLK	1,603	,213	7,531	***	par_12
Y15 <--- PAT	1,000				
Y14 <--- PAT	,850	,120	7,101	***	par_13
Y13 <--- PAT	1,087	,144	7,540	***	par_14
Y11 <--- PAT	,786	,121	6,490	***	par_15
Y21 <--- KLK	1,000				
X10 <--- SPI	,841	,127	6,627	***	par_17

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
PAT <--- SPI	,672
KLK <--- SPI	,366
KLK <--- PAT	,632
X1 <--- SPI	,700
X3 <--- SPI	,695
X5 <--- SPI	,676
X7 <--- SPI	,607
X11 <--- SPI	,595
X12 <--- SPI	,748
X14 <--- SPI	,608
X17 <--- SPI	,616

	Estimate
Y22 <--- KLK	,571
Y23 <--- KLK	,800
Y25 <--- KLK	,817
Y26 <--- KLK	,853
Y27 <--- KLK	,825
Y15 <--- PAT	,713
Y14 <--- PAT	,715
Y13 <--- PAT	,772
Y11 <--- PAT	,654
Y21 <--- KLK	,644
X10 <--- SPI	,661

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	SPI	PAT	KLK
PAT	,672	,000	,000
KLK	,366	,632	,000
X10	,661	,000	,000
Y11	,000	,654	,000
Y13	,000	,772	,000
Y14	,000	,715	,000
Y15	,000	,713	,000
Y27	,000	,000	,825
Y26	,000	,000	,853
Y25	,000	,000	,817
Y23	,000	,000	,800
Y22	,000	,000	,571
Y21	,000	,000	,644
X17	,616	,000	,000
X14	,608	,000	,000
X12	,748	,000	,000
X11	,595	,000	,000
X7	,607	,000	,000
X5	,676	,000	,000
X3	,695	,000	,000
X1	,700	,000	,000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	SPI	PAT	KLK
PAT	,000	,000	,000
KLK	,425	,000	,000
X10	,000	,000	,000
Y11	,440	,000	,000
Y13	,519	,000	,000
Y14	,481	,000	,000
Y15	,480	,000	,000
Y27	,653	,522	,000
Y26	,675	,539	,000
Y25	,646	,516	,000
Y23	,634	,506	,000
Y22	,452	,361	,000
Y21	,510	,407	,000
X17	,000	,000	,000
X14	,000	,000	,000
X12	,000	,000	,000
X11	,000	,000	,000
X7	,000	,000	,000
X5	,000	,000	,000
X3	,000	,000	,000
X1	,000	,000	,000

AUTOBIOGRAFI



Emy Dwi Trisnani

Lahir di Madiun, 10 Maret 1974, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana tahun 2000. Tahun 2006 diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Tahun 2012 menjabat sebagai Kasie Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Inspektorat.

Mulai tahun 2013 diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Setelah bekerja sembilan tahun mendapat kesempatan melanjutkan studi S2 dengan beasiswa Program STAR Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).